



POTENSI EKOLOGI, SOSIAL BUDAYA, DAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL



2021



Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



POTENSI EKOLOGI, SOSIAL BUDAYA, DAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

HASIL KAJIAN

2021



Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Potensi Ekologi, Sosial Budaya, dan Ekonomi dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Penanggungjawab

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

Koordinator

Ir. Mohamad Yani Marsidik

Penulils

Slamet Rahmat Topo Susilo, S.S., M.Kesos.

Ir. Enny Ariani

Ir. Danarti

Lisa Yuniarti, S.P., M.Si.

Ir. Suparyo Hugeng

Ir. Mohamad Yani Marsidik

Prasetijo, S.E.

Desain Cover dan Tata Letak

Fauzan Aidinul Hakim, S.Si.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cetakan Pertama 2022

Diterbitkan Oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

ISBN Dicetak oleh Percetakan

Isi diluar tanggung jawab percetakan



SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Kabupaten Sigi merupakan kabupaten daerah tertinggal yang masuk ke dalam zona kebencanaan karena pernah mengalami likuifaksi dan gempa pada tahun 2018. Sebagai salah satu kabupaten yang menjadi prioritas nasional untuk diantaskan, maka formulasi kebijakan untuk menjawab kebutuhan tersebut memerlukan analisis tidak hanya pada penentuan indikator ketertinggalannya namun juga aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi yang menjadi satu kesatuan dalam memberi gambaran terhadap kebutuhan yang menangkap kondisi Sigi sesungguhnya.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 pasal 4 ayat 1 menyebutkan enam kriteria untuk mengukur ketertinggalan suatu daerah, sedangkan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dijelaskan indikator dari masing-masing kriteria. Nyatanya, indikator-indikator tersebut pada dasarnya hanya menghitung tingkat ketertinggalan yang belum mewakili data dan informasi yang komprehensif dalam mengintervensi kebijakan. Karenanya, dipandang perlu menambahkan informasi kebijakan yang dapat mendeskripsikan potensi daerah yaitu menyangkut aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi sehingga akan dihasilkan bahan kebijakan yang lebih representatif menangkap kebutuhan sesungguhnya terhadap program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Kajian ini memaparkan potensi Kabupaten Sigi dari tiga aspek yaitu ekologi, sosial budaya, dan ekonomi yang dapat ditangkap oleh tim kajian selama proses pelaksanaan kajian. Tim kajian berharap, data dan informasi dalam laporan kajian ini dapat digunakan para pemangku kepentingan yang terkait utamanya para penyusun kebijakan. Kami mengucapkan terimakasih untuk seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan kajian ini.

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

NIP.19710819 199201 1 003

Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

KATA PENGANTAR

KETUA TIM KAJIAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT dengan telah selesainya laporan Kajian Potensi Ekologi, Sosial Budaya, dan Ekonomi dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Laporan kajian ini dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tim atas tugas yang diembankan pada kami untuk memberikan solusi dalam rangka pengentasan daerah tertinggal.

Kajian Potensi Ekologi, Sosial Budaya, dan Ekonomi dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menemukan adanya tiga potensi, yaitu ekologi, sosial budaya, dan ekonomi yang sangat berperan dalam mengentaskan daerah tertinggal. Berbicara tentang potensi ekologi, banyak daerah yang dikategorikan daerah tertinggal memiliki keterbatasan dari keberadaan faktor ekologi, seperti geografis, kondisi alam, dan juga aksesibilitas. Permasalahan ekologi berpengaruh terhadap sosial budaya (pendidikan, kesehatan, adat istiadat). Adanya permasalahan ekologi dan sosial budaya berdampak pada ekonomi. Daerah tertinggal memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi karena tidak mendapat dukungan dari sisi faktor sosial budaya dan ekologi, potensi tersebut akhirnya tidak dapat dioptimalkan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan kajian ini terutama kepada Bappedalitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Pertanian di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga kajian ini bermanfaat

terutama sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Slamet Rahmat Topo Susilo, S.S., M.Kesos.

NIP.19680929 199803 1 001

Ketua Tim Kajian Potensi Ekologi, Sosial Budaya, dan Ekonomi dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria: (a) perekonomian masyarakat, (b) sumber daya manusia, (c) sarana dan prasarana, (d) kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan (f) karakteristik daerah. Sedangkan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dijelaskan indikator dari masing-masing kriteria.

Indikator daerah tertinggal yang berjumlah 22 tersebut pada dasarnya hanya untuk menghitung tingkat ketertinggalan sehingga dipandang tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai dasar dalam menentukan intervensi kebijakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sebagai contoh, kriteria perekonomian masyarakat hanya memuat indikator PDRB per kapita, persentase pengeluaran rumah tangga non makanan, dan persentase penduduk bekerja di sektor non pertanian. Untuk itu, dipandang perlu menambahkan informasi kebijakan yang dapat mendeskripsikan potensi daerah menyangkut aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan intervensi kebijakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Perspektif ekologi dipilih atas dasar bahwa daerah tertinggal sangat dipengaruhi oleh faktor alam, seperti letak geografis, aksesibilitas, dan kondisi lingkungan alam. Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam daerah tertinggal yang mengalami kebencanaan dan

likuifaksi yang cukup parah. Di samping itu, faktor sosial budaya juga sangat mempengaruhi ketertinggalan suatu daerah, akibat faktor ekologi yang menyebabkan kesulitan akses berdampak pada sosial budaya.

Demikian juga dari sisi ekonomi, rata-rata daerah tertinggal terbelang memiliki tingkat ekonomi sangat lemah terutama terkait akses, permodalan, dan juga pemasaran yang perlu dukungan dari pemerintah. Walaupun kita akui bahwa banyak daerah tertinggal memiliki komoditas unggulan yang bernilai tinggi, tetapi karena keterbatasan akses, permodalan, pemasaran dan SDM sehingga kurang berkembang.

DAFTAR ISI

Sambutan.....	iii
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3. TUJUAN	5
1.4. SASARAN.....	5
1.5. MANFAAT.....	6
1.6. RUANG LINGKUP	6
1.7. KERANGKA PEMIKIRAN.....	6
1.8. METODE PENELITIAN.....	7
1.8.1. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN.....	7
1.8.2. PENDEKATAN PENELITIAN	7
1.8.3. JENIS, PENGUMPULAN, DAN ANALISIS DATA.....	8
1.8.3.1. Jenis Data.....	8
1.8.3.2. Pengumpulan Data	8
1.8.3.3. Analisis Data	9

2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL	11
2.1.1. PENGERTIAN DAERAH TERTINGGAL	11
2.1.2. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN	13
2.2. KEBIJAKAN KABUPATEN SIGI	16
2.3. UNSUR POTENSI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	19
2.3.1. EKOLOGI.....	22
2.3.2. SOSIAL BUDAYA.....	24
2.3.3. EKONOMI	25
3. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
3.1. KONDISI UMUM KABUPATEN SIGI	29
3.1.1. LETAK GEOGRAFIS.....	29
3.1.2. LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK	30
3.2. KETERTINGGALAN KABUPATEN SIGI	34
3.3. POTENSI EKOLOGI	41
3.3.1. KEBENCANAAN	42
3.3.1.1. Pengetahuan Tentang Bencana	43
3.3.1.2. Rencana Tanggap Darurat.....	44
3.3.1.3. Peringatan Dini	44
3.3.1.4. Mobilisasi Sumberdaya	44
3.3.2. INFRASTRUKTUR PERTANIAN (DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA SETELAH GEMPA).....	45
3.3.3. PELESTARIAN LINGKUNGAN.....	52
3.3.3.1. Latar Belakang Pengembangan TANE, TAPE, dan TAKE.....	52
3.3.3.2. Inisiatif TAPE, TANE, TAKE dalam Struktur Transfer Fiskal	54
3.3.3.3. Variasi Formula TAPE dan TAKE.....	55
3.4. POTENSI SOSIAL-BUDAYA	56
3.4.1. PENINGKATAN KEWASPADAAN KONFLIK	56
3.4.1.1. Pengertian dan Bentuk Konflik Sosial	56
3.4.1.2. Potensi Konflik Kabupaten Sigi	58
3.4.2. PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL.....	61
3.4.2.1. <i>Sintuvu</i> sebagai Budaya Gotong Royong	61
3.4.2.2. <i>Nosarara Nosabatutu</i> (Prinsip Kekeluargaan dan Persatuan)	62
3.4.2.3. <i>Nosibolai</i> (Prinsip Keterbukaan).....	62
3.4.2.4. <i>Tonda Talusi</i> (Prinsip Harmoni)	63

3.4.3. PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DAN MILENIAL.	64
3.4.3.1. Pemberdayaan Perempuan.	64
3.4.3.2. Pemberdayaan Milenial.	69
3.5. POTENSI EKONOMI.	74
3.5.1. PRODUK UNGGULAN	74
3.5.2. AGROBISNIS	78
3.5.3. AGROINDUSTRI.	80
3.5.4. AGROWISATA	82
3.5.5. DIGITALISASI KELEMBAGAAN EKONOMI (UMKM DAN BUMDES)	84
3.5.6. PENGEMBANGAN PASAR	88
4. KESIMPULAN DAN SARAN.	91
4.1. KESIMPULAN	91
4.2. SARAN/REKOMENDASI KEBIJAKAN	92
DAFTAR PUSTAKA.	95
Lampiran	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kriteria dan Indikator Daerah Tertinggal	2
Tabel 2.	Varibel Pengambilan Data	8
Tabel 3.	Persentase dan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Sigi	31
Tabel 4.	Nama Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Jarak dari Kabupaten	32
Tabel 5.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi.....	32
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Kab. Sigi Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 7.	Indeks Daerah Tertinggal Kabupaten Sigi Tahun 2019.....	34
Tabel 8.	Kriteria Daerah Tertinggal Kabupaten Sigi Tahun 2019.....	36
Tabel 9.	Luas Lahan Sawah Terdampak Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Lahan di Wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala – Sulawesi Tengah.....	47

Tabel 10. Jumlah Kelompok dan Anggota Rumahtangga Petani yang Terdampak Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Lahan di Wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala – Sulawesi Tengah.....	48
Tabel 11. Perubahan Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Usaha Tani yang Dilakukan Rumahtangga Petani Setelah Gempa Bumi, Likuefaksi, dan Tsunami di Wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala – Sulawesi Tengah.....	49
Tabel 12. Perubahan Rerata Pendapatan Rumahtangga Petani Setelah Gempa Bumi, Likuefaksi, dan Tsunami di Wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala – Sulawesi Tengah.....	50
Tabel 13. Insiasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia	53
Tabel 14. Kerangka Regulasi Pengembangan EFT	54
Tabel 15. Pendapatan Petani Sebelum dan Setelah Gempa di Kabupaten Sigi	67
Tabel 16. Beberapa Penerapan Teknologi untuk Produk Agroindustri	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 2. Peta Kabupaten Sigi.....	30
Gambar 3. Peta Sebaran Gempa Bumi Kabupaten Sigi....	42
Gambar 4. Dokumentasi di Lokasi Desa Padende dan Desa Kabobona Kabupaten Sigi.....	98
Gambar 5. Dokumentasi Rapat FGD di Ruang Pertemuan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi	101
Gambar 6. Dokumentasi Diskusi Terkait Kajian di Kantor Bappeda Kabupaten Sigi	102
Gambar 7. Dokumentasi Rapat Internal Pembahasan Penyusunan Laporan Kajian Potensi Ekologi, Ekonomi, dan Sosial Budaya.....	103

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kesenjangan antarwilayah dan ketertinggalan suatu daerah, sampai saat ini masih menjadi isu yang harus diatasi sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Penyebab terjadinya kesenjangan tersebut sangatlah beragam mulai dari perbedaan ketersediaan sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, kemajuan ekonomi, hingga pada aspek sosial budaya. Kesenjangan pembangunan tersebut ditunjukkan dengan masih adanya daerah-daerah yang tingkat perkembangannya masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya dengan kata lain keberadaan daerah tertinggal sebagai indikator adanya kesenjangan dalam pembangunan.

Beberapa isu strategis pembangunan daerah tertinggal diantaranya adalah: (a) Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal; (b) Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; (c) Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal; (d) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal; (e) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal; (f) Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal; (g) Belum optimalnya pengelolaan potensi

sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; (h) Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (i) Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal; dan (j) Belum optimalnya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Provinsi Papua dan Papua Barat (www.bappenas.go.id).

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria: (a) perekonomian masyarakat, (b) sumber daya manusia (c) sarana dan prasarana, (d) kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan (f) karakteristik daerah. Sedangkan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dijelaskan indikator dari masing-masing kriteria. Berikut kriteria dan indikator daerah tertinggal (Tabel 1).

TABEL 1. KRITERIA DAN INDIKATOR DAERAH TERTINGGAL

No.	Kriteria	Indikator							
1	Perekonomian Masyarakat	1		2			3		
2	Sumber daya manusia	4		5		6		7	
3	Sarana dan prasarana	8	9	10	11	12	13	14	15 16
4	Kemampuan keuangan daerah	17							
5	Aksesibilitas	18		19			20		
6	Karakteristik daerah	21			22				

Keterangan Indikator:

Indikator 1: PDRB per kapita

Indikator 2: Persentase pengeluaran rumah tangga non makanan

Indikator 3: Persentase penduduk bekerja di sektor non pertanian

Indikator 4: Persentase wanita usia 15-49 tahun yang melahirkan dalam 2 tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis

- Indikator 5: Persentase balita diberi imunisasi lengkap
- Indikator 6: APS SMP
- Indikator 7: APS SMA
- Indikator 8: Persentase desa yang mempunyai pertokoan
- Indikator 9: Persentase desa yang mempunyai fasilitas Kesehatan
- Indikator 10: Persentase desa ada praktik dokter
- Indikator 11: Persentase desa yang mempunyai SD
- Indikator 12: Persentase desa yang mempunyai SMP
- Indikator 13: Persentase rumah tangga pengguna listrik
- Indikator 14: Persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam
- Indikator 15: Persentase penduduk pengguna internet
- Indikator 16: Persentase rumah tangga pengguna air bersih
- Indikator 17: PAD Per Kapita
- Indikator 18: Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton
- Indikator 19: Persentase desa yang mudah mencapai fasilitas Kesehatan
- Indikator 20: Persentase desa yang mudah mencapai SMP
- Indikator 21: Persentase desa yang tidak mengalami bencana
- Indikator 22: Persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial

Indikator daerah tertinggal yang berjumlah 22 tersebut pada dasarnya hanya untuk menghitung tingkat ketertinggalan sehingga dipandang tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai dasar dalam menentukan intervensi kebijakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal (hasil diskusi dengan unit teknis). Sebagai contoh, kriteria perekonomian masyarakat hanya memuat indikator PDRB per kapita, persentase pengeluaran rumah tangga non makanan, dan persentase penduduk bekerja di sektor non pertanian. Untuk itu, dipandang perlu ditambahkan informasi kebijakan yang bisa mendeskripsikan potensi daerah menyangkut aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan intervensi kebijakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Perspektif ekologi dipilih atas dasar bahwa daerah tertinggal sangat dipengaruhi oleh faktor alam, seperti letak geografis, aksesibilitas, kondisi lingkungan alam. Seperti di Kawasan Timur Indonesia yang paling banyak daerah tertinggal, hal ini karena faktor alam sangat berperan. Sosial budaya juga sangat mempengaruhi ketertinggalan suatu daerah, akibat faktor ekologi yang menyebabkan kesulitan akses berdampak pada sosial budaya. Demikian juga ekonomi, rata-rata daerah tertinggal, ekonominya sangat lemah terutama terkait akses, permodalan, dan

juga pemasaran yang perlu dukungan dari pemerintah. Walaupun kita akui bahwa banyak daerah tertinggal memiliki komoditas unggulan yang bernilai tinggi, tetapi karena keterbatasan akses, permodalan, pemasaran, dan SDM sehingga kurang berkembang.

Karakteristik atau ciri daerah tertinggal ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam membangun daerah tertinggal. Pembangunan bidang ekonomi misalnya yang dilakukan dengan skala besar atau masif harus memperhatikan dengan serius mempertimbangkan kondisi lokal yang ada.

Pembangunan dan aktivitas ekonomi, dari masing-masing daerah tertinggal memiliki perbedaan pendekatan dengan yang dilakukan di daerah yang telah maju. Demikian pula fungsi sifat ekologi daerah tertinggal yang berbeda, membuat pertimbangan ekologi merupakan keharusan dalam membangun daerah tertinggal. Dalam memanfaatkan ekologi harus tetap menjaga keseimbangan dan stabilitas lingkungan serta mengutamakan keberlanjutan sumber daya alam.

Sementara itu secara tradisi, penduduk lokal di daerah tertinggal memiliki pengetahuan (*indigenous knowledge dan indigenous technology*) tentang potensi sumber daya alam yang ada dan pengelolaannya, namun bisa saja pengetahuan dan teknologi yang dimiliki belum sempurna dan perlu adanya sentuhan pengetahuan dan teknologi modern yang mudah dicerna (*Neo-Endogenous Rural Development*)

Kabupaten-kabupaten dengan tingkat ketertinggalan yang sama belum tentu intervensi kebijakannya akan sama, disinilah letak pentingnya kajian potensi ekologi, sosial budaya, dan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal karena akan memberikan informasi kondisi riil daerah tertinggal dan kebijakan yang tepat.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Untuk mengentaskan daerah tertinggal perlu suatu intervensi khusus, dimana intervensi tersebut harus berbasis data dan informasi. Namun data dan informasi berupa indikator yang ada tidak mencukupi untuk dijadikan dasar dalam menentukan intervensi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Untuk itu, diperlukan unsur-unsur potensi dari aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan intervensi. Permasalahannya (1) Bagaimana unsur-unsur potensi daerah tertinggal yang dibutuhkan dalam penentuan intervensi kebijakan; (2) Bagaimana potensi daerah tertinggal mencakup aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan intervensi kebijakan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal.

1.3. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi unsur-unsur potensi daerah tertinggal yang dibutuhkan dalam penentuan intervensi kebijakan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Mendeskripsikan potensi daerah tertinggal mencakup aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan intervensi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

1.4. SASARAN

Sasaran penelitian ini adalah:

1. Teridentifikasinya unsur-unsur potensi daerah tertinggal yang dibutuhkan dalam penentuan intervensi kebijakan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

2. Informasi tentang potensi ekologi, sosial budaya dan ekonomi untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai dasar dalam penentuan intervensi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

1.5. MANFAAT

Kajian ini dapat menjadi informasi dalam penyusunan intervensi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang mencakup aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi.

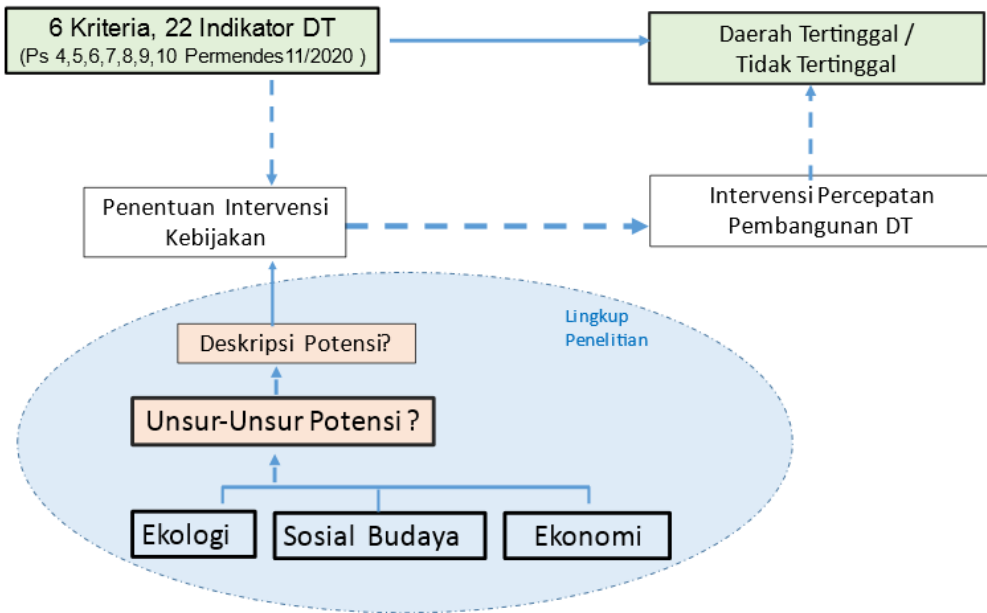
1.6. RUANG LINGKUP

1. Potensi Daerah Tertinggal dilihat dari aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi.
2. Unsur-unsur potensi daerah tertinggal dilihat dari aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi.

1.7. KERANGKA PEMIKIRAN

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, menetapkan suatu daerah termasuk kategori tertinggal dengan menggunakan enam kriteria dan 22 indikator. Dengan sejumlah indikator tersebut dipandang belum cukup untuk penentuan intervensi kebijakan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal sehingga selain kriteria tersebut, diperlukan unsur-unsur tambahan terkait dengan potensi daerah. Unsur-unsur tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekonomi.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



1.8. METODE PENELITIAN

1.8.1. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan September - Desember 2021. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

1.8.2. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk merumuskan unsur-unsur potensi daerah tertinggal mencakup aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi.

1.8.3. JENIS, PENGUMPULAN, DAN ANALISIS DATA

1.8.3.1. JENIS DATA

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui pengamatan langsung di lapang (observasi), wawancara mendalam, dan diskusi kelompok. Data sekunder yang terkait dengan isu kebijakan pembangunan daerah tertinggal, kondisi ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Secara rinci data yang dicari pada tabel berikut.

TABEL 2. VARIBEL PENGAMBILAN DATA

No.	Variabel	Unsur-Unsur	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Ekologi (interaksi manusia dan alam untuk keseimbangan)	a. Kebencanaan b. Infrastruktur pertanian c. Kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • BPS • Bappedalitbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara terstruktur • Observasi
2.	Sosial Budaya (norma aturan, jejaring dan kepercayaan (trust))	a. Konflik Sosial b. Kearifan Lokal c. Pemberdayaan Perempuan dan Milenial	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • BPS • Bappedalitbang • Monografi Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Observasi
3.	Ekonomi	a. Produk Unggulan b. Agribisnis c. Agroekonomi d. Agrowisata	<ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • BPS • Bappedalitbang • Monografi Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD: masyarakat, tokoh masyarakat, kelompok • Wawancara Terstruktur Observasi

1.8.3.2. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara mendalam, dan observasi. Studi kepustakaan untuk memperoleh informasi kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang dikeluarkan dari berbagai K/L. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengungkap realitas dari kajian dengan mewawancarai *key person/key informan* baik itu pelaku maupun pejabat yang terkait. *FGD* dilakukan di tingkat kabupaten untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang telah dilakukan dalam melaksanakan pembangunan daerah

tertinggal, serta kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi daerah tertinggal. Adapun observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting lokasi sampel.

1.8.3.3. ANALISIS DATA

Analisis data potensi dilakukan secara deskriptif. Menurut Sugiyono (2009), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka. Langkah-langkahnya adalah reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks, kemudian penarikan kesimpulan. Data ekologi, sosial budaya, dan ekonomi akan dianalisis sebagai bahan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal.

2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL

2.1.1. PENGERTIAN DAERAH TERTINGGAL

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Ada 62 daerah yang ditetapkan tertinggal.

Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, seperti dijelaskan Pasal 2 Perpres No. 63 Tahun 2020, yaitu: 1) Perekonomian masyarakat, 2) Sumber daya manusia, 3) Sarana dan prasarana, 4) Kemampuan keuangan daerah, 5) Aksesibilitas; dan 6) Karakteristik daerah.

Tercatat, 62 daerah tertinggal tersebut tersebar di lima pulau besar yaitu Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku-Nusa Tenggara, dan Pulau Papua dengan distribusi di berbagai provinsi, yakni 22 kabupaten di Provinsi Papua, 8 kabupaten di Papua Barat, 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 1 kabupaten di Nusa Tenggara Barat, 6 kabupaten di Maluku, 2 kabupaten di Maluku Utara, 3 kabupaten di Sulawesi Tengah, 4

kabupaten di Sumatra Utara, 1 Kabupaten di Sumatra Barat, 1 kabupaten di Sumatra Selatan, dan 1 Kabupaten di Lampung. Jumlah ini jauh turun dari total 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dalam periode sebelumnya. Sebaran Kabupaten Tertinggal menurut wilayah diantaranya untuk wilayah Sumatera terdapat 11 kabupaten, Jawa sebanyak 1 kabupaten, Kalimantan ada 12 kabupaten, Sulawesi sebanyak 18 kabupaten, Nusa Tenggara terdapat 25 kabupaten, Maluku sebanyak 25 kabupaten, dan Papua sebanyak 33 kabupaten. Sampai saat ini sudah 17 kabupaten/daerah lepas dari daerah tertinggal. Dan 50 kabupaten/daerah lainnya berpotensi melepaskan dari ketertinggalan. Sebaran dari masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat).
2. Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai)
3. Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Musi Rawas Utara)
4. Provinsi Lampung (Kabupaten Basir Barat)
5. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Utara)
6. Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka)
7. Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi)
8. Provinsi Maluku (Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan)
9. Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Talibau)

10. Provinsi Papua Barat (Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak)
11. Provinsi Papua (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai).

Adanya Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, mengamanahkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk merumuskan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Untuk itu setiap tahun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan dengan menargetkan pengentasan daerah tertinggal sebanyak delapan belas kabupaten tertinggal.

2.1.2. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) bertujuan untuk, Pertama, mempercepat pengurangan kesenjangan antara daerah dalam menjamin terwujudnya persatuan dan keadilan pembangunan nasional, Kedua, mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana daerah tertinggal. Ketiga, meningkatkan

koordinasi integrasi dan sinkronisasi Pusat-Daerah dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang menjamin terselenggarakan PPDT.

Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah proses, upaya, dan tindakan keberpihakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal.

Dalam rangka percepatan pembangunan di 62 daerah tertinggal yang telah ditetapkan serta sebagai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas merancang kebijakan terpadu untuk mengentaskan 62 daerah tertinggal tersebut. Dari sisi target, di akhir 2024, sebanyak 25 daerah tertinggal direncanakan akan keluar dari klasifikasi daerah tertinggal. Skenario rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat dari 58,82 di tahun 2019 menjadi sekitar 62,2–62,7 pada 2024. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal juga dibidik menurun dari 25,82 persen di 2019 menjadi 23,5–24 persen di 2024. (Suharso, 2020)

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas melakukan mainstreaming 62 daerah tertinggal sebagai lokasi prioritas daerah afirmasi, yaitu dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Berbagai program pembangunan yang dibiayai dari skema anggaran kementerian/lembaga maupun dari skema Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk fokus memprioritaskan daerah afirmasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di 62 daerah tertinggal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kemendesa PDTT menargetkan paling sedikitnya mengentaskan delapan puluh Kabupaten Tertinggal atau delapan belas

Kabupaten Tertinggal untuk setiap tahunnya dari 122 Kabupaten Tertinggal yang ada saat ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015.

Dalam upaya pengentasan ketertinggalan suatu daerah diperlukan upaya kerja sama dari semua pihak, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dengan adanya keberpihakan kepada daerah tertinggal, setidaknya pada tiga bidang yaitu bidang perencanaan, bidang penganggaran, dan bidang pelaksanaan, diharapkan daerah tertinggal akan lepas dari ketertinggalan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah dengan keberadaan dana desa yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan peningkatan kualitas daerah tertinggal.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan ada tiga kebijakan pembangunan yang dipilih menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN 2020-2024. Pertama, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) di sekitar pusat pertumbuhan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /*Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat atau *no one left behind*.

Kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola afirmatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas, dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai

basis ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan. Ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan.

Dalam konteks desa, pemerintah mendorong setiap daerah tertinggal untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan. Hal ini penting mengingat banyaknya potensi sumber daya alam, baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, maupun sumber daya mineral yang tersebar di 62 daerah tertinggal dan belum dimanfaatkan secara optimal.

2.2. KEBIJAKAN KABUPATEN SIGI

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026, yaitu: “Kabupaten Sigi yang berdaya saing berbasis Agribisnis”. Dengan indikator pertumbuhan ekonomii, IPM dan kemiskinan. Berdaya saing dalam arti suatu keunggulan pembeda dari yang lain yang terdiri dari keunggulann komparatif dan keunggulan kompetitif. Daya saing merupakan kesanggupan, kemampuan dan kekuatan ungtuk bersaing atau kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sigi RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “Pertanian Berbasis Konservasi Sumber Daya Alam dan Berbudaya” yang dijabarkan ke dalam Misi: “Meningkatkan dan Mengembangkan Pertanian melalui intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi”. Agribisnis, adalah bisnis berbasis usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan) atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan “hulu” dan “hilir” mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (*food supply chain*). Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Agribisnis mempelajari

strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Berdaya saing berbasis agribisnis menjadi satu. Kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Perwujudan kesejahteraan diupayakan melalui Pertumbuhan Ekonomi, yang pada hakekatnya merupakan indikator peningkatan produk dari kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya, pembangunan manusia, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM), yang merupakan indeks komposit yang terdiri dari sektor pendidikan (indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama hidup), dan sektor ekonomi (indeks daya beli).

Pengembangan sektor ekonomi (fokus kepada pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta pemerataan pendapatan) dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Upaya tersebut akan berhasil jika didukung oleh pemerintahan yang baik dan bersih, serta terciptanya ketertiban, keamanan dan keharmonisan di masyarakat. Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Rumusan Misi yang dimaksud untuk pencapaian Visi 2021-2026 adalah:

1. Memantapkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing berbasis agribisnis;
3. Melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola, supremasi hukum dan HAM;
4. Memperkuat kualitas ketertiban, keamanan, dan harmoni sosial;
5. Melanjutkan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana;
6. Meningkatkan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pertanian, alam dan budaya;
7. Meningkatkan dan mengembangkan koperasi dan umkm sebagai pilar ekonomi;
8. Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan jaminan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
10. Melestarikan dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal;
11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan wilayah konservasi;
12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara ideal dan merata seluruh wilayah;
13. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan pada semua jenjang pemerintahan;
14. Meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antar sektor dan stakeholder pembangunan;
15. Mempertahankan kelestarian hutan dan lingkungan hidup;
16. Meningkatkan harmoni sosial dan kesiapsiagaan bencana.
17. Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dengan strategi;
18. Pemetaan dan pengembangan rencana umum jangka panjang pengembangan ekonomi kerakyatan;
19. Penyediaan sarana prasarana pendukung dan penyiapan ekosistem ekonomi kerakyatan;

20. Penataan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan;
21. Pembentukan dan/atau implementasi kebijakan yang pro pengembangan ekonomi kerakyatan daerah secara partisipatif dan sesuai perkembangan dan kebutuhan;
22. Penguatan kapasitas pelaku ekonomi kerakyatan baik dari aspek nilai kewirausahaan, strategi bisnis, pengembangan permodalan, promosi usaha, pemasaran dan mitra sinergi usaha.

Pembangunan Desa, tujuan pada sektor ini adalah menjadikan desa-desa di Kabupaten Sigi masuk dalam kategori mandiri/maju, *Smart Villages*, Desa Siaga Bencana dan Desa Inklusif yang juga masuk dalam dalam Kawasan Pengembangan *One Village One Product (OVOP)*. Dengan strategi:

1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem sarana dan prasarana perekonomian guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat;
2. Fasilitasi usaha UMKM, Koperasi, Pro Gender, kaum papah/marginal dalam akses manajemen usaha, permodalan dan pemasaran;
3. Fasilitasi Pelaku UMKM, Koperasi dalam mengakses dan mengembangkan sistem usaha berbasis elektronik;
4. Pengembangan ekosistem usaha UMKM secara komprehensif dari hulu ke hilir secara berkesinambungan.

2.3. UNSUR POTENSI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pengembangan wilayah merupakan suatu proses untuk mengarahkan segala potensi wilayah yang bersangkutan untuk didayagunakan secara terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Proses pendayagunaan itu biasanya berupa kombinasi dari penerahan beberapa faktor yang saling menunjang terhadap satu sama lain sehingga dapat diperoleh hasil tertentu. Menurut Taliziduhu Ndaraha (2002:126) "Pengembangan wilayah adalah kombinasi antara pendayagunaan potensi manusia

untuk mengolah sumber daya alam yang terdapat dalam wilayahnya”. Jadi dapat diartikan pengembangan wilayah adalah suatu usaha untuk mengeksplorasi suatu sumber energi tertentu yang dari hasil-hasilnya boleh diharapkan akan dapat menunjang usaha peningkatan kesejahteraan rakyat.

Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah: Sebagai *growth center*, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan yang ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya; Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerja sama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah; Pola pengembangan wilayah bersifat integral; Dalam pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme diantaranya.

Dalam sejarah perkembangannya, bongkar pasang konsep pengembangan wilayah di Indonesia terdapat beberapa landasan teori yang turut mewarnai keberadaannya. Pertama adalah Walter Isard sebagai seorang pelopor ilmu wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab dan akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Kedua adalah Hirschmann (era 1950 an) yang memunculkan teori *polarization effect* dan *trickling down effect* dengan argumentasi bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (*unbalanced development*). Ketiga adalah Myrdal (era 1950 an) dengan teori yang menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah *backwash effect* dan *spreadwash effect*. Keempat adalah Freadmann (era 1960 an) yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Kelima adalah Douglass (era 70 an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa-

kota (*rural-urban linkages*) dalam pengembangan wilayah. Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah di atas kemudian diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran putra-putra bangsa. Diantaranya adalah Sutami (era 1970 an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hiriarki kota- kota dan hikarki prasarana jalan melalui orde kota. Selanjutnya adalah Ruslan Diwiryono (era 1980 an) yang memperkenalkan konsep pola dan struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No 24/1992 Tentang Penataan Ruang.

Menurut Lay (1993:53) indikator yang mempengaruhi pengembangan wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran, dan konsentrasi investasi, serta ketersediaan sarana prasarana. Jadi berdasarkan pernyataan Lay diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator yang mempengaruhi dalam pengembangan wilayah itu terbagi atas:

1. **Fisik:** Ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan, dan sarana perekonomian.
2. **Ekonomi:** Kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan keluarga pada masing- masing daerah.
3. **Sosial:** Jumlah penduduk dan kualitas penduduk.

Williamson menyatakan bahwa ketidakmerataan pertumbuhan antar wilayah akan cenderung semakin membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses pembangunan.

Secara umum beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya peningkatan ketidakmerataan antar wilayah tersebut (Aditya, 2012) yaitu:

1. Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki keahlian dari daerah-daerah kurang berkembang ke daerah-daerah yang telah berkembang;

2. Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang karena faktor pasar dimana keuntungannya relatif besar;
3. Kebijakan pemerintah, cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sarana dan prasarana di daerah yang telah berkembang.

Daerah tertinggal pada dasarnya memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan berdasar tipologi wilayahnya. Pemanfaatan sumber daya secara optimal dapat menstimulus kegiatan perekonomian daerah dan berpeluang menciptakan keunggulan komparatif. Menurut Muta'ali (2015) negara berkembang pada umumnya memiliki keunggulan komparatif pada sektor sumber daya alam dan bahan baku.

Informasi tentang suatu daerah tertinggal diperlukan dalam menentukan kebijakan apa yang diperlukan dalam pengembangannya. Mengingat setiap daerah tertinggal memiliki kekhususan yang akan berdampak kepada kebijakan percepatan pembangunannya. Pada umumnya tantangan dalam pembangunan di Indonesia adalah dari aspek fisik geografisnya, ketersediaan sarana, dan prasarana penunjang, serta sumber daya manusia. Untuk itu dalam rancangan percepatan pembangunan di daerah tertinggal tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi tipologi, dan kondisi fisik geografisnya.

Informasi daerah tertinggal tersebut tentunya memiliki permasalahan berbeda dan perlu penanganan secara spesifik lokasi.

2.3.1. EKOLOGI

Ekologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Di dalam ekologi akan terjadi interaksi, saling ketergantungan, keanekaragaman, keharmonisan, dan kemampuan berkelanjutan. Pada daerah tertinggal ekologi dapat berupa hutan, laut, pegunungan. Salah satu kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang termasuk di dalamnya lingkungan sosial

adalah menjaga agar tetap terjadi keberlanjutan. Dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan utamanya didasari oleh penekanan ekologi, dimana setiap komponen ekologi mulai dari yang terkecil tak boleh luput dari perhatian. Penekanan ekologis akan menjadi komponen penting bagi berkelanjutan lingkungan, bukan hanya karena potensinya mengurangi dampak kerusakan suatu lingkungan, tapi juga karena potensinya untuk mengenalkan konsep baru tentang hubungan manusia dengan alam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya). Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Menurut Ernst Haeckel ekologi adalah ilmu yang komprehensif yang mempelajari hubungan antar organisme dengan lingkungannya. (Rahayu Efendi, dkk, 2018)

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme atau organisme dengan lingkungannya. Berdasarkan perkembangannya ekologi bisa disebut sebagai ilmu dasar lingkungan, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam rumah tangganya atau ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup sesamanya dengan komponen di sekitarnya.

Dalam ekologi, ada yang dinamakan sistem ekologi atau ekosistem. Tiga hal penting yang mendasari ekosistem adalah faktor biotik (makhluk hidup), faktor abiotik (lingkungan), serta hubungan yang terjadi antar keduanya. Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi, bila komponen-komponen ekosistem dalam jumlah yang berimbang. Keseimbangan tersebut harus tetap terjaga sehingga akan menjadi keberlanjutan dan aliran energi dalam ekosistem akan tetap terjaga.

Ekologi menganut prinsip keseimbangan dan keharmonisan semua komponen alam. Terjadinya bencana alam merupakan contoh keseimbangan dan keharmonisan alam terganggu. Ekologi memandang

mahluk hidup sesuai dengan perannya masing-masing. Semua makhluk hidup di alam memiliki peran yang berbeda dalam menciptakan keharmonisan dan keseimbangan alam. (MODUL vol 18 no 2, issues period 2018. Rahayu Efendi, dkk, 2018. Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan)

2.3.2. SOSIAL BUDAYA

Modal sosial merupakan hal sangat penting dalam masyarakat, karena hal ini menjadi perekat antarkelompok masyarakat yang satu dan yang lainnya. Modal sosial yang dimaksud disini adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antarwarga masyarakat dan kelompok masyarakat. (Adi, 2008).

Terkait dengan norma dan aturan, pemahaman akan kebudayaan masyarakat menjadi sangat penting. Kebudayaan sebagai pengetahuan manusia yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif digunakan para pendukung/pelakunya untuk mengintegrasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai referensi/pedoman untuk bertindak. Perwujudan dari penggunaan secara selektif kebudayaan ada pada masing-masing norma dan aturan yang berlaku. Dalam norma dan aturan tersebut tampak segala tindakan dan tingkah laku dari individu sebagai anggota masyarakat. (Bambang Rudito & Melia Famiola, 2013). *Trust* (kepercayaan), setidaknya terdiri dari jaringan adalah kumpulan dari hubungan (Bambang Rudito & Melia Famiola, 2013).

Budaya suatu daerah biasanya berbeda dengan budaya dan adat istiadat daerah lainnya. Untuk itu pengembangan aspek sosial budaya lokal masyarakat daerah tertinggal perlu mendapat perhatian secara proporsional dari pemangku kepentingan sebagai dua sisi yang saling melengkapi.

Sering terjadi dan banyak contoh, pengembangan aspek sosial budaya menjadi pemicu perkembangan aspek ekonomi suatu masyarakat. Permasalahan sosial yang sering menonjol antara satu daerah dengan daerah lainnya umumnya hampir sama pemicunya yaitu masalah kemiskinan penduduk. Permasalahan sosial juga dapat berimplikasi pada muncul dan kompleksnya pelbagai permasalahan (kesejahteraan) sosial, seperti: fakir miskin, rumah tidak layak huni, lanjut usia (terlantar), remaja putus sekolah, tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Disamping itu, juga mabuk-mabukan dikalangan pemuda, disamping judi.

Meskipun telah banyak dilakukan upaya untuk meminimalisasi permasalahan sosial melalui pemberdayaan, namun demikian, dari sisi keberhasilan (fungsionalitasnya bagi masyarakat), keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan tersebut masih perlu mendapat perhatian. Bila masalah sosial tidak ditanganani dengan baik, maka warga miskin di daerah tertinggal dikhawatirkan dapat memicu persoalan lain seperti keamanan dan masalah kebangsaan.

2.3.3. EKONOMI

Keberagaman kondisi antar daerah dengan daerah lain mengakibatkan perbedaan kesempatan ekonomi daerah, sehingga pertumbuhan setiap daerah tidak bisa disamakan (Luthfi Muta'ali, 2011). Selanjutnya Soetomo, 2006, menjelaskan, kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain tetapi karena berbagai sebab kawasan tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan sosial ekonomi penduduknya tetap rendah.

Faktor perekonomian masyarakat merupakan salah satu indikator dalam penentuan Daerah Tertinggal. Salah satu bentuk intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Kemendesa PDTT untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Daerah Tertinggal adalah dengan mengembangkan produk unggulan di Daerah Tertinggal. Produk unggulan adalah produk yang dapat memberikan nilai tambah dan

sumbangan pendapatan tertinggi pada suatu perekonomian daerah. Menurut Huseini (2011), ada tiga hal menarik menyangkut produk/komoditas unggulan, yaitu Pertama, penentuan produk unggulan memegang peran kunci dalam pengembangan perekonomian daerah, Kedua, tidak semua daerah sukses dalam pengembangan produk unggulan di daerahnya, dan Ketiga, penentuan produk unggulan dapat dilakukan dengan metoda yang berbeda-beda.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2010), produk unggulan merupakan produk yang potensial dikembangkan di suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global.

Produk unggulan yang dihasilkan dari suatu wilayah diharapkan dapat dijalankan oleh BUMDes dan BUMDes Bersama di setiap Kabupaten Tertinggal, sehingga dengan pengembangan produk unggulan di Daerah Tertinggal dapat meningkatnya perekonomian masyarakat di suatu wilayah dan diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* bagi indikator lain di Daerah Tertinggal.

Faktor infrastruktur dan konektivitas antar wilayah sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi, maka dengan membangun infrastruktur dan konektivitas di daerah tertinggal diharapkan dapat menghilangkan hambatan dalam transportasi dan interaksi ekonomi. Dampak lain yang dapat dilihat adalah masyarakat dapat memasarkan hasil pertanian dan usaha lainnya, dan berbagai sumber daya yang ada bisa diolah dan dikembangkan menjadi kegiatan usaha produktif yang menggerakkan ekonomi setempat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tertinggal.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur potensi yang berpeluang dibutuhkan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal antara lain: (1) aspek ekologi: lingkungan, kebencanaan, permukiman, kerentanan; (2) aspek sosial budaya: Norma/

aturan, *trust*/kepercayaan, jejaring, adat istiadat, budaya; (3) aspek ekonomi: kelembagaan, komoditas unggulan, pemasaran, tata niaga.

3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. KONDISI UMUM KABUPATEN SIGI

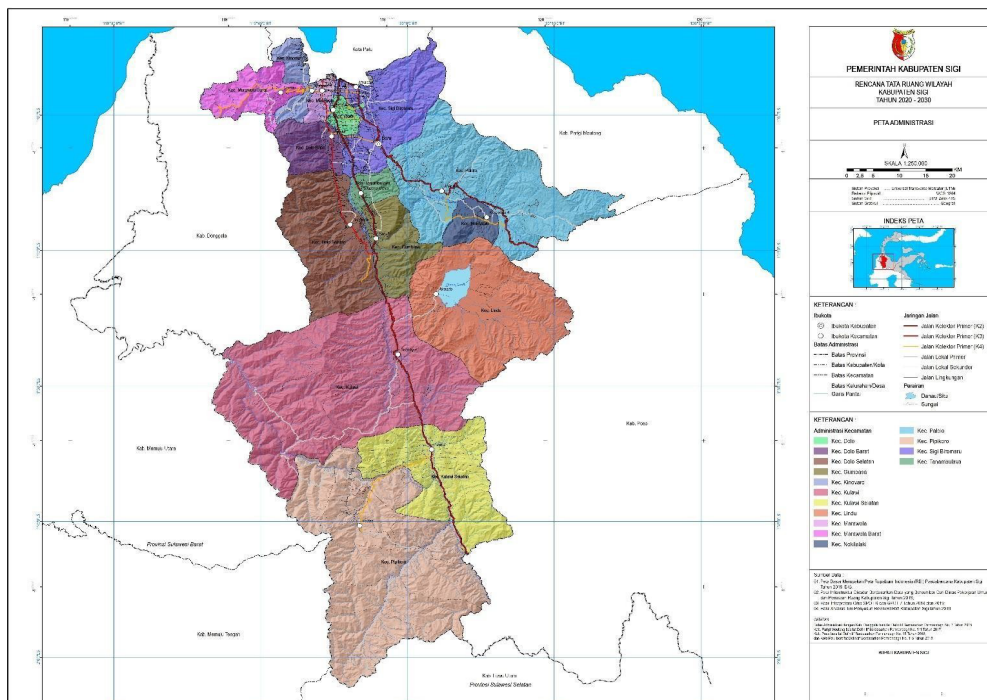
3.1.1. LETAK GEOGRAFIS

Secara geografis Kabupaten Sigi memiliki luas 5.218,82 km² atau sekitar 8,40 persen dari total luas wilayah Sulawesi Tengah yaitu 61,841,29 km². Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Sigi terletak pada koordinat 0°52' 16" - 2° 03' 21" Lintang Selatan dan 119° 38' - 120° 21' 24" Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri atas dataran, hutan dan lembah pegunungan, sehingga dapat dipetakan menjadi dua kawasan yakni: wilayah lembah dan pegunungan. Wilayah dataran atau lembah meliputi tujuh kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan wilayah lembah yaitu Kecamatan Marawola, Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat, Sigi Biromaru, Gumbasa, dan Tanambulawa. Sedangkan kecamatan berada di wilayah pegunungan yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu: Kecamatan Kulawi, Kulawi selatan, Pipikoro, Palolo, Lindu, Nokilalaki, Marawola Barat, Kinovaro dan Sigi Kota.

Berdasarkan posisi geografisnya, batas-batas Kabupaten Sigi adalah:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Donggala dan Kota Palu
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
3. Sebelah Barat: Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala
4. Sebelah Timur: Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso

Gambar 2. Peta Kabupaten Sigi



3.1.2. LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Kabupaten Sigi yang memiliki enam belas kecamatan, memiliki luas wilayah yang berbeda-beda dan sangat beragam, ada satu kecamatan yang luasnya 30 kali lipat dari kecamatan yang lain. Secara sederhana luas wilayah kecamatan di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3. PERSENTASE DAN LUAS WILAYAH PER KECAMATAN DI KABUPATEN SIGI

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase
1	Kulawi	112.964	21,65%
2	Kulawi Selatan	41.158	7,89%
3	Pipikoro	101.264	19,41%
4	Lindu	59.225	11,35%
5	Palolo	65.251	12,50%
6	Nokilalaki	7.396	1,42%
7	Dolo	3.585	0,69%
8	Dolo Selatan	39.296	7,53%
9	Dolo Barat	12.092	2,32%
10	Marawola	3.778	0,72%
11	Kinovaro	7.722	1,48%
12	Marawola Barat	14.376	2,75%
13	Sigi Biromaru	30.860	5,91%
14	Gumbasa	17.054	3,27%
15	Tanambulava	5.644	1,08%
16	Sigi Kota	150	0,03%
17	Kabupaten Sigi	521.815	100,00%

Sumber: Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2021

Secara topografi Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan kawasan pegunungan dan perbukitan, dengan ketinggian wilayah umumnya berada antara 60m sampai 2.500m di atas permukaan laut. Tingkat kemiringan tanah/lereng antara datar sampai sangat curam. Kondisi topografis tersebut mempengaruhi wilayah permukiman desa di mana dari 176 desa sebagian besar berada di daerah dataran dan pegunungan. Berikut ditampilkan jumlah nama ibukota kecamatan, jumlah desa masing-masing kecamatan serta jarak dari ibukota kabupaten.

TABEL 4. NAMA IBUKOTA KECAMATAN, JUMLAH DESA DAN JARAK DARI KABUPATEN

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jarak dari Kabupaten
1	Kulawi	Bolapapu	16	62
2	Kulawi Selatan	Lawua	12	96
3	Pipikoro	Peana	19	123
4	Lindu	Tomado	5	89
5	Palolo	Makmur	21	25
6	Nokilalaki	Kamarora A	5	35
7	Dolo	Kota Pulu	9	7
8	Dolo Selatan	Bulubete	12	12
9	Dolo Barat	Kaleke	12	7
10	Marawola	Binangga	11	18
11	Kinovaro	Porame	10	20
12	Marawola Barat	Dombu	12	33
13	Sigi Biromaru	Mpanau	10	14
14	Gumbasa	Pakuli	7	32
15	Tanambulava	Sibalaya Utara	5	17
16	Sigi Kota	Bora	10	0

Sumber: Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Sigi Sebanyak 239.321 yang tersebar di 16 kecamatan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 5. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SIGI

No.	Kecamatan	Penduduk		
		2010	2015	2020
1	Pipikoro	7,82	8,35	8,72
2	Kulawi Selatan	8,47	9,04	9,44
3	Kulawi	14,17	15,13	15,81
4	Lindu	4,69	5,03	5,25
5	Nokilalaki	5,63	6,01	6,26
6	Palolo	27,39	29,18	30,44
7	Gumbasa	11,68	12,47	13,01

No.	Kecamatan	Penduduk		
		2010	2015	2020
8	Dolo Selatan	14,45	15,42	16,08
9	Dolo Barat	12,58	13,42	14,01
10	Tanambulava	7,87	8,40	8,77
11	Dolo	20,59	21,97	22,93
12	Sigi Biromaru	42,86	45,74	47,71
13	Marawola	20,99	22,40	23,36
14	Marawola Barat	6,38	6,81	7,10
15	Kinovaro	9,47	10,11	10,54
16	Sigi	215,03	229,47	239,42

Sumber: Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2021

Dari data tabel terlihat bahwa penduduk Kabupaten Sigi terkonsentrasi di Kecamatan Sigi Biromaru, Palolo, Marowola dan Dolo dan sisanya tersebar diberbagai kecamatan.

TABEL 6. JUMLAH PENDUDUK KAB. SIGI MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	11.628	10.873	22.501
2	5-9	11.652	11.237	22.889
3	10-14	10.800	10.015	20.815
4	15-19	10.631	9.588	20.219
5	20-24	10.305	9.479	19.784
6	25-29	9.451	8.850	18.301
7	30-34	9.390	8.875	18.265
8	35-39	9.591	9.196	18.787
9	40-44	9.099	8.852	17.951
10	45-49	8.189	7.841	16.030
11	50-54	6.670	6.660	13.330
12	55-59	5.346	5.207	10.553
13	60-64	3.997	3.762	7.759
14	65+	5.951	6.286	12.237

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Jumlah	122.700	116.721	239.421

Sumber: Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2021

3.2. KETERTINGGALAN KABUPATEN SIGI

Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Sigi, IPM Kabupaten Sigi Tahun 2020 sebesar 68,12 masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 69,55 dan Nasional sebesar 71,94. Sedangkan untuk Capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sigi Tahun 2020 adalah 69,99 tahun dan berada di atas rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 68,69 tahun namun demikian masih terdapat permasalahan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama di daerah terpencil di mana diharapkan Pemerintah Kabupaten Sigi terus berupaya mengatasi hal tersebut dengan berbagai program untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat.

TABEL 7. INDEKS DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN SIGI TAHUN 2019

Kode	Kriteria	Indikator	Nilai Indeks
A	Sarana dan Prasarana	Persentase Desa yang Mempunyai Per-tokoan	14.689
		Persentase Desa yang Mempunyai Fasilitas Kesehatan	32.203
		Persentase Desa yang Mempunyai Dokter	6.215
		Persentase Desa yang Mempunyai Sekolah Dasar	98.305
		Persentase Desa yang Mempunyai Sekolah Menengah Pertama	45.763
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	98.780
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Tele-pon/Telepon Genggam	83.842

Kode	Kriteria	Indikator	Nilai Indeks
		Persentase Penduduk Pengguna Internet	30.677
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	53.313
B	Aksesibilitas	Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama Terluas Aspal/Beton	67.797
		Persentase Desa yang Mudah Mencapai Fasilitas Kesehatan	82.486
		Persentase Desa yang Mudah Mencapai Sekolah Menengah Pertama	85.311
C	Karakteristik Daerah	Persentase Desa yang Tidak Mengalami Bencana	1.130
		Persentase Desa yang Tidak Mengalami Konflik Sosial (Perkelahian Massal)	96.610
D	Ekonomi	PDRB Per-Kapita	53.162
		Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Non-Makanan	51.496
		Persentase Penduduk yang Bekerja di Sektor Non-Pertanian	50.638
E	Sumber Daya Manusia	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Dengan Penolong Persalinan Tenaga Medis	92.169
		Persentase Balita Diberi Imunisasi Lengkap	43.543
		Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	90.641
		Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas	67.616
F	Kemampuan Keuangan Daerah	PAD Per-Kapita	51.810

Sumber: Ditjen PPDT, 2021

**TABEL 8. KRITERIA DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019**

Kode	Kriteria	Jumlah
A	Sarana dan Prasarana	51.532
B	Aksesibilitas	78.531
C	Karakteristik Daerah	48.870
D	Ekonomi	51.765
E	Sumber Daya Manusia	73.492
F	Kemampuan Keuangan Daerah	51.810
Penghitungan Indeks Komposit Kabupaten		59.009

Sumber: Ditjen PPDT, 2021

Penyebab ketertinggalan Kabupaten Sigi baik sebelum maupun sesudah gempa 2018 ada beberapa, antara lain, Pertama perekonomian masyarakat, angka kemiskinan di Kabupaten Sigi meningkat baik jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin naik dari 29,14 ribu jiwa di Tahun 2015 menjadi 30,82 ribu jiwa di Tahun 2019. Demikian pula, persentase penduduk miskin meningkat dari 12,75 persen di Tahun 2015 menjadi 12,91 persen di Tahun 2019. Bila dibedah lebih detail berdasarkan Basis Data Terpadu Tim nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT-TNP2K), maka konsentrasi Rumah Tangga Miskin (RTM) terbanyak berada di Kecamatan Sigi Biromaru dan Palolo masing-masing mencapai 2.242 KK dan 2.213 KK.

Jumlah RTM di DT Kabupaten Sigi mencapai 7.726 KK. Selain itu, konsentrasi RTM desil 1 berada di lima kecamatan yakni Kecamatan Lindu, Nokilalaki, Dolo Barat, Dolo dan Dolo Selatan. Program jaring pengaman sosial tepat pada lima kecamatan itu untuk menjaga daya beli masyarakat seperti pada kondisi sekarang. Selanjutnya, konsentrasi kenaikan RTM terjadi pada empat kecamatan yakni Lindu, Pipikoro, Kulawi dan Palolo. Hal ini berarti penguatan kelembagaan ekonomi di empat kecamatan menjadi sangat mendesak. Namun, pada desil 4, semua kecamatan di DT Kabupaten Sigi mengalaminya. Apalagi pasca rusaknya jaringan irigasi Gumbasa sangat memukul masyarakat di

sepanjang aliran irigasi ini. Semoga irigasi ini cepat tertangani dalam dua tahun mendatang.

Dilihat dari Angka kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Sigi mengalami kenaikan dari 1,98 poin di Tahun 2015 menjadi 2,17 poin di Tahun 2019. Hal ini berarti baik jumlah jiwa maupun jumlah rumah tangga miskin, semakin menjauh terjerembab ke dasar kemiskinan semakin besar. Demikian pula angka keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,51 poin di Tahun 2015 menjadi 0,60 poin di Tahun 2019. Hal ini berarti ketimpangan baik antar sesama penduduk miskin maupun antar rumah Tangga miskin semakin melebar. Strategi penanganan masalah ini sebaiknya diletakkan pada usaha mengatasi kedalaman kemiskinan saja karena untuk mengatasi keparahan kemiskinan, membutuhkan strategi, waktu, dan perencanaan yang lama.

Perlu digarisbawahi adalah adanya penurunan jumlah pengangguran terbuka dari 5,74 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Tahun 2015 menjadi 2,61 persen di Tahun 2019. Hal ini sangat menggembirakan karena pengangguran terbuka dapat memicu munculnya masalah sosial seperti pencurian, perkelahian antar desa (PaD) yang pernah menjadi stigma buruk bagi Kabupaten Sigi dan semoga hal ini tidak akan terjadi lagi. Angka pengangguran terbuka pada 2019 di Kabupaten Sigi ini lebih rendah dibandingkan angka pengangguran di Provinsi Sulteng dan Kota Palu pada tahun yang sama. Saatnya bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sigi memiliki database pekerja, pekerja paruh waktu, setengah pengangguran, pengangguran terbuka agar dapat menjadi landasan bagi penyusunan strategi penciptaan lapangan kerja utamanya selaras dengan program Pra Kerja dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini mengalami penurunan 0,1 poin dari 0,31 poin di Tahun 2015 menjadi 0,30 poin di Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sigi berada pada kategori ketimpangan “moderat”. Angka ini menunjukkan bahwa di Tahun 2015, ada 1 persen penduduk Sigi menguasai 31 persen kekayaan

Sigi. Selanjutnya, di Tahun 2019, 1 persen penduduk Sigi menguasai 30 persen kekayaan Sigi.

Kedua, kinerja pembangunan sumberdaya manusia pada sisi jarak dari rumah penduduk ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sebagai satu di antara tiga kabupaten tertinggal di Sulawesi Tengah, dari sisi pendidikan, rata-rata jarak ke SD/MI di DT Kabupaten Sigi mencapai 13,50 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasional antara SD/MI dengan tempat tinggal anak usia sekolah 8,73 km. Ini berarti dari sisi jarak rumah penduduk dan SD/MI, Kabupaten Sigi patut memperpendek jarak tersebut terutama berkaitan sekolah satu atap yang berbasis pada potensi rombongan belajar dan ketersediaan guru kelas. Jarak rumah penduduk ke SMP/MTs di DT Kabupaten Sigi mencapai 13,43 km. Sedangkan Jarak rata-rata nasional ke SMP/MTs hanya 7,97 km. Hal ini berarti baik SD/MI maupun SMP/MTs di Kabupaten Sigi berjarak hampir dua kali lipat yang tentunya faktor topografi bergunung dan lerang mempersulit anak ke sekolah. Dari sisi kesehatan, rata-rata jarak praktik dokter di daerah tertinggal di Kabupaten Sigi mencapai 34 km. Sedangkan rata-rata nasional jarak praktik dokter ke rumah penduduk hanya berjarak 18,51 km. Rata-rata jarak praktik bidan di DT Kabupaten Sigi mencapai 34,36 km. Sedangkan rata-rata jarak nasional praktik bidan, hanya 16,69 km. Hal ini mengindikasikan bahwa jarak pelayanan publik masih menjadi kendala utama di DT Kabupaten Sigi yang hampir dua kali lipat jarak nasional. Rata-rata ketersediaan dokter per kecamatan di DT Kabupaten Sigimencapai 8,77 orang atau 9 orang. Sedangkan rata-rata ketersediaan dokter nasional mencapai 11,2 atau 11 dokter. Rata-rata jarak rumah penduduk ke puskesmas di daerah tertinggal Kabupaten Sigi mencapai 14,22 km. Sedangkan Rata-rata jarak rumah penduduk ke Puskesmas nasional hanya 8,91 km. Rata-rata jarak Pustu di daerah tertinggal Kabupaten Sigi mencapai 12,96 km. Sedangkan, rata-rata jarak ke Pustu nasional hanya 7,6 km. Secara umum, ukuran jarak rumah penduduk ke pusat pelayanan publik, Kabupaten Sigi sebagai kabupaten tertinggal dua kali di bawah jarak nasional.

Kinerja pembangunan manusia di DT Kabupaten Sigi tertinggal 0,10 kali lipat di belakang Provinsi Sulawesi Tengah pada 2015. Di Tahun 2015, kinerja pembangunan manusia ini lebih tertinggal lagi yakni 1,02 kali lipat di belakang IPM Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat dari IPM Kabupaten Sigi berada di bawah IPM Sulteng masing-masing 65,35 poin bagi Sigi dan 66,76 poin bagi Sulteng. Di Tahun 2019, IPM Donggala dan Sulteng masing-masing 68,16 poin dan 69,50 poin. Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sigi di Tahun 2015 mencapai 8,13 tahun atau rata-rata pendidikan penduduk Sigi pada kelas 2 SMP/MTs 13 hari lebih tinggi dari RLS Sulteng mencapai 7,97 atau kelas 1 SMP/MTs 3 bulan 7 hari. Sayangnya, di Tahun 2019, RLS Sigi dilampaui oleh RLS Sulteng masing-masing mencapai 8,53 tahun bagi Sigi dan 8,75 tahun bagi Sulteng. Bila kita menggunakan data terpilah, maka Angka Harapan Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sigi pada periode 2015-2019 berada di bawah Sulteng. Di Tahun 2015, HLS laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sigi mencapai 11,83 tahun dan 12,42 tahun. Sedangkan HLS tahun yang sama Sulteng masing-masing mencapai 12,39 tahun dan 13,12 tahun. Lalu di Tahun 2019, angka tersebut menunjukkan masing-masing laki-laki dan perempuan mencapai 12,63 tahun dan 13,08 tahun di Sigi dan 12,95 tahun dan 13,50 tahun di Sulteng. Hal ini menunjukkan bahwa lama sekolah siswa laki-laki lebih singkat ketimbang perempuan baik di Sigi maupun di Sulteng.

Data terpilah Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sigi lebih panjang daripada Sulawesi Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh (BPS, 2020) yakni di Tahun 2015, UHH Kabupaten Sigi baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mencapai 66,69 tahun dan 70,52 tahun, dan di Sulteng masing-masing mencapai 65,34 tahun dan 69,26 tahun. Di Tahun 2019, UHH tersebut berturut-turut mencapai 67,54 tahun dan 71,49 tahun di Kabupaten Sigi, serta mencapai 66,32 tahun dan 70,26 tahun di Sulteng. UHH menjadi modal utama Sigi dalam peningkatan sumber daya manusia mungkin saja sebagai lumbung pangan Sulteng, Sigi mempunyai bumbu alamiah di perdesaan pegunungan jauh dari sentuhan penyedap buatan yang dominan di perkotaan.

Dilihat dari kesehatan, di Tahun 2019, Kabupaten Sigi mempunyai angka stunting tertinggi ketiga di Sulteng di bawah DT Donggala dan DT Tojo Una-Una. Angka Stunting tersebut mencapai 3.547 balita stunting dari 14.422 balita terintry setiap bulan di Sigi Tahun lalu. Hal ini berarti proporsi balita stunting di Kabupaten Sigi mencapai 24,6 persen. Data Kemenkeu (2020) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah merealisasikan dana sebesar Rp 116,9 miliar DAK Fisik bagi penanganan stunting. Semoga hal ini berdampak positif, walaupun pola asuh dan pola asah dalam rumah tangga sangat berpengaruh di perdesaan.

Ketiga, indikator sarana dan prasarana menunjukkan bahwa kondisi jalan di DT Kabupaten Sigi dalam kondisi mantap mencapai 55,78 persen. Sedangkan kondisi jalan rata-rata nasional dalam kondisi mantap mencapai 48,78 persen. Hal ini berarti infrastruktur jalan di DT Kabupaten Sigi lebih baik dari nasional. Selanjutnya, Rasio Elektrifikasi di DT Kabupaten Sigi mencapai 76,9 persen. Sedangkan Rasio elektrifikasi rata-rata nasional mencapai 83,18 persen. Hal ini berarti Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Sigi berada di bawah nasional. Pengguna Air Bersih di DT Kabupaten Sigi mencapai 55,58 persen. Sedangkan Pengguna Air Bersih rata-rata Nasional mencapai 66,55 persen. Hal ini berarti bahwa DT Kabupaten Sigi tertinggal 1,20 kali lipat di belakang nasional. Jangkauan Signal Telpon Seluler di DT Kabupaten Sigi mencapai 47,97 persen. Sedangkan desa-desa rata-rata nasional yang belum terakses signal telepon tinggal 32,11 persen. Hal ini menunjukkan DT Kabupaten Sigi tertinggal akses komunikasi walaupun lebih baik keterjangkauannya ketimbang nasional.

Keempat, pada sisi keuangan daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah di Tahun 2019, mencapai 3,18 persen. Sedangkan rasio Dana Transfer mencapai 63,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Kabupaten Sigi mempunyai Kapasitas Fiskal kategori “Tinggi”, tetapi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) masih sangat tinggi. Selanjutnya, kesehatan fiskal Kabupaten Sigi berada pada kategori “Sangat Kurang Sehat”, di Tahun 2018. Ruang fiskal Kabupaten Sigi melayani masyarakat mencapai 58,48 persen.

Kelima, pada sisi aksesibilitas, dan keenam, yakni karakteristik wilayah, DT Kabupaten Sigi menghadapi kendala klasik ini. Kecamatan di pegunungan seperti Kulawi Selatan, Pipikoro, Lindu, Nokilalaki, Marawola Barat, Palolo, Dolo Barat menghadapi kendala ini. Kondisi aksesibilitas dan karakteristik wilayah menjadikan mahalnya kebutuhan pangan, sandang, papan karena adanya kecamatan yang hanya dapat diakses oleh kendaraan roda dua sebagai pengganti kuda di masa lalu.

Diluar keenam kriteria tersebut perlu juga pembenahan sumberdaya manusia, Reformasi Birokrasi, penyusunan bersama dan terpadu rencana dan Implementasi Money Follow Program (MFP). Saat ini, Kabupaten Sigi telah mempunyai Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Palolo yang dapat menjadi kutub pertumbuhan dan menginisiasi RPKP Kulawi Raya bagi komoditas kopi maupun RPKP Pariwisata di kawasan Dolo dan Marawola serta melibab Universitas Tadulako yang mempunyai lahan pertanian bagi pendampingan masyarakat di Sibalaya dan Palolo.

3.3. POTENSI EKOLOGI

Seperti diawal dikatakan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme atau organisme dengan lingkungannya. Berdasarkan perkembangannya ekologi bisa disebut sebagai ilmu dasar lingkungan, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam rumah tangganya atau ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup sesamanya dengan komponen di sekitarnya. Ekologi menganut prinsip keseimbangan dan keharmonisan semua komponen alam. Terjadinya bencana alam merupakan contoh keseimbangan dan keharmonisan alam terganggu. Ekologi memandang makhluk hidup sesuai dengan perannya masing-masing.

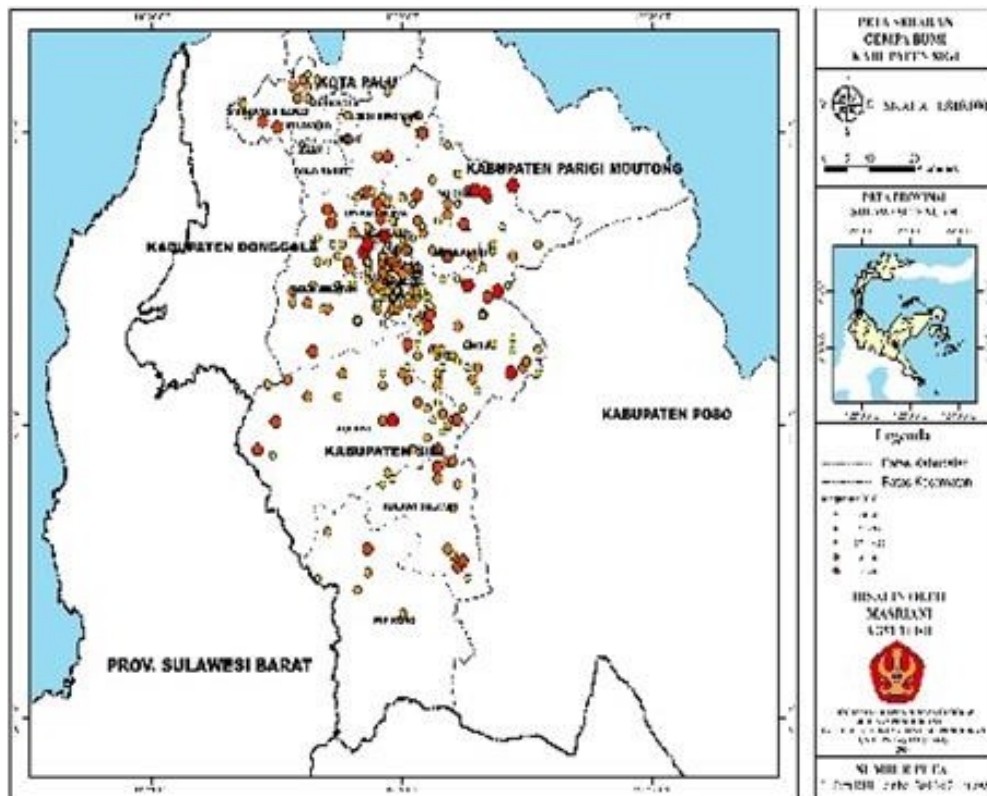
Kabupaten Sigi sebagai wilayah konservasi di mana sebagian besar wilayahnya adalah hutan, baik hutan yang berstatus taman nasional, hutan lindung, taman hutan raya, cagar biosfir yang harus terus dijaga kelestarian fungsinya terutama sebagai paru-paru dunia, wilayah

tangkapan air, penyedia bahan makanan dan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian tersebut pada sisi yang lain dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama perdagangan karbon, sedang bagi masyarakat melalui aktivitas ekologi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Namun demikian pembangunan Kabupaten Sigi agar memperhatikan beberapa faktor ekologis diantaranya.

3.3.1. KEBENCANAAN

Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap gempa bumi. Berdasarkan data yang diperoleh dari peta sebaran gempa bumi Kabupaten Sigi tahun 2000-2016 tercatat bahwa terdapat 261 kali gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sigi dengan magnitudo terendah yaitu 2,70SR sampai dengan yang paling tertinggi yaitu 6,30SR.

Gambar 3. Peta Sebaran Gempa Bumi Kabupaten Sigi



Berdasarkan kondisi gempa bumi tersebut tentunya dalam menghadapi gempa bumi tersebut masyarakat harus lebih waspada dan juga selalu siap siaga. Oleh karena itu perlu adanya kesiapsiagaan masyarakat setempat baik dari segi pengetahuannya tentang gempa bumi maupun dari segi langkah antisipasi yang dilakukan masyarakat. Kesiapsiagaan perlu dilakukan agar risiko yang mungkin ditimbulkan dari gempa tersebut dapat terminimalisir. Kesiapsiagaan yang paling utama adalah pengetahuan. Adanya pengetahuan tentang gempa bumi serta dampak-dampak yang ditimbulkan akan membuat masyarakat menjadi lebih tanggap dan siap untuk menghadapi bencana gempa bumi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko atau dampak negatif yang timbul akibat dari gempa bumi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Ada 4 parameter kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi diperoleh hasil sebagai berikut:

3.3.1.1. PENGETAHUAN TENTANG BENCANA

Pengetahuan tentang gempa serta risiko bencana mencakup pengertian bencana alam, kejadian yang menimbulkan bencana, penyebab gempa, ciri-ciri gempa kuat dan bangunan tahan gempa serta tindakan yang dilakukan apabila terjadi gempa. Pengetahuan atau *knowledge* adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengungkapkan atau mengingat kembali pengetahuan, rumus-rumus konsep, prinsip-prinsip, materi dan kejadian baik pada hal-hal yang umum maupun khusus. Pengetahuan kebencanaan akan dibutuhkan bagi setiap orang yang tinggal di daerah rawan bencana, karena berbagai informasi mengenai jenis bencana, prosedur penyelamatan diri, tempat yang disarankan untuk mengungsi, dan informasi lain yang mungkin dibutuhkan seseorang pada sebelum, saat dan pasca bencana itu terjadi.

3.3.1.2. RENCANA TANGGAP DARURAT

Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Rencana tanggap darurat berupa kewaspadaan keluarga terhadap kemungkinan bencana, tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan diri dan tempat menyelamatkan diri.

3.3.1.3. PERINGATAN DINI

Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Peringatan dini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, karena itu pengetahuan tentang tanda/bunyi peringatan, pembatalan dan kondisi aman dari bencana sangat diperlukan. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui peringatan sangat diperlukan, demikian juga dengan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, ke mana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana masyarakat sedang berada saat terjadi bencana. Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana tidak kalah pentingnya dengan parameter lainnya. Adanya peringatan dini dapat mengurangi korban jiwa, harta benda, dan kerusakan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, ke mana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana masyarakat sedang berada saat terjadi bencana.

3.3.1.4. MOBILISASI SUMBERDAYA

Parameter mobilisasi sumber daya baik sumber daya manusia (SDM), pendanaan, dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat merupakan potensi yang dapat mendukung kesiapsiagaan. Namun sebaliknya, mobilisasi sumber daya juga dapat menjadi kendala apabila

mobilisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mobilisasi sumber daya merupakan parameter kesiapsiagaan yang cukup penting.

3.3.2. INFRASTRUKTUR PERTANIAN (DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA SETELAH GEMPA)

Bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) Sulawesi Tengah tahun 2018 sebesar 7.3 skala richter disertai likuifaksi dan tsunami yang menghancurkan kehidupan di sepanjang garis pantai wilayah tersebut, dan daratan di beberapa lokasi bencana tersebut berdampak pada kerusakan infrastruktur, kehilangan aset, penurunan pendapatan, dan kehilangan jiwa. Hasil penelitian geologi dan antropologi wilayah Sulawesi Tengah berada pada posisi retakan (sesar). Bencana alam merupakan peristiwa alam yang menimbulkan mitigasi atau resiko atau bahaya bagi kehidupan manusia. Akibat yang ditimbulkan dari bencana adalah kerugian berupa jiwa maupun harta benda manusia dan kerusakan terhadap lingkungan. Potensi terhadap terjadinya bencana untuk masa yang akan datang masih cukup besar dan mungkin akan bertambah jenisnya, seperti pengaruh perubahan penggunaan lahan dari lahan hutan atau pertanian menjadi kawasan permukiman, maupun penentuan lokasi kawasan permukiman yang tidak sesuai (Setyowati, 2007).

Adanya perubahan lahan pertanian pasca gempa, likuifaksi, dan tsunami di wilayah Pasigala diduga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, tidak hanya bagi pemilik lahan, tetapi bagi para petani penggarap. Tjondronegoro (1984) menyatakan perubahan sosial yang diakibatkan alih fungsi lahan hilangnya pendapatan petani penggarap karena berkurangnya lahan pertanian semakin berkurangnya cadangan tanah yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Menurut Kusdiane, et. al (2016) kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung berubah perlahan disebabkan alih fungsi lahan pertanian. Masyarakat menjadi kehilangan sarana untuk berinteraksi, hilangnya sumber-sumber nafkah dari sektor pertanian menyebabkan petani mengalami kesulitan untuk kembali beraktifitas menekuni bidang

pertanian, sehingga alternatifnya adalah bekerja menjadi buruh di luar sektor pertanian mengakibatkan kontinuitas aktifitas ekonomi masyarakat terganggu. Perubahan fungsi lahan pertanian diduga menyebabkan buruh tani kehilangan mata pencaharian utama, pertanian mengalami penurunan produktivitas pada beberapa komoditas yang diusahakan pada wilayah tersebut terutama tanaman pangan: lahan persawahan baik irigasi teknis maupun tadah hujan.

Potensi kehilangan hasil produksi dengan rerata dua ton per musim tanam dalam dua kali musim tanam per tahun. Terkait fenomena tersebut, memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat terutama bagi rumahtangga petani. Masalah jangka panjang untuk sektor pertanian yaitu hilangnya sebagian lahan usahatani. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Rachman, et al, (2008) bahwa pasca tsunami mengakibatkan lahan sawah terendam air laut secara permanen, rusaknya lahan usahatani oleh erosi, meningkatnya kadar garam (salinitas) tanah, rusaknya sistem irigasi dan drainase, lumpuhnya sistem produksi dan pemasaran hasil pertanian, dan rendahnya ketersediaan tenaga kerja pertanian yang terampil. Terkait hal ini maka pentingnya informasi teknologi yang sesuai dengan kondisi lahan pasca bencana alam. Inovasi teknologi dapat diperoleh melalui media informasi, dan pentingnya kelompok tani yang merupakan wadah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam berusaha tani.

Adanya kelompok tani dalam suatu usaha tani dapat memudahkan dalam menyampaikan informasi teknologi ataupun penyampaian program yang sesuai dengan tujuan terbentuknya kelompok tani tersebut. Kelompok tani merupakan media untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani secara dinamis. Peran kelompok tani terhadap anggotanya berdampak terhadap aktivitas usaha tani yang dilakukan, sehingga anggota kelompok secara serius dan terus menerus dapat mengembangkan usaha tani nya untuk peningkatan produktivitas usaha tani dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumatangga.

TABEL 9. LUAS LAHAN SAWAH TERDAMPAK BENCANA BERDASARKAN TINGKAT KERUSAKAN LAHAN DI WILAYAH KOTA PALU, KABUPATEN SIGI, DAN KABUPATEN DONGGALA - SULAWESI TENGAH

Kabupaten/ Kota	Luas Lahan Sebelum Bencana (Ha)	Luas Terdampak Berdasarkan Kerusakan (Ha)			Total (Ha)
		Ringan	Sedang	Berat	
Palu	537,3	315,00	93,35	85,48	493,83
Sigi	16.913,0	5.334,91	895,14	380,14	6.611,20
Donggala	12.237,0	133,50	0	117,55	251,05
Jumlah	30.363,3	5.831,45	993,27	583,17	7.356,08

Sumber: BPTP Sulawesi Tengah, 2019 dan Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan data pada Tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga petani yang mengalami kerusakan lahan dengan tingkat kerusakan berat, sedang, dan ringan secara keseluruhan sebesar 7.353 anggota yang tersebar di 26 Kecamatan, 82 Desa, dan 300 kelompok tani yang berada di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Data pada Tabel 9 terlihat bahwa Kabupaten Sigi merupakan wilayah yang terbesar terdampak gempa bumi dan likuifaksi. Sebanyak 503 anggota kelompok tani yang lahan sawahnya mengalami kerusakan berat yang tersebar di lima kecamatan, tiga belas desa, dan dua puluh kelompok tani. Seperti dikemukakan oleh Djoni et al (2000) bahwa kelompok yang dinamis ditandai oleh selalu adanya kegiatan ataupun interaksi baik di dalam maupun dengan pihak luar kelompok untuk secara efektif dan efisiensi mencapai tujuan-tujuannya.

TABEL 10. JUMLAH KELOMPOK DAN ANGGOTA RUMAHTANGGA PETANI YANG TERDAMPAK BENCANA BERDASARKAN TINGKAT KERUSAKAN LAHAN DI WILAYAH KOTA PALU, KABUPATEN SIGI, DAN KABUPATEN DONGGALA - SULAWESI TENGAH

Tingkat Kerusakan	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Anggota Kelompok Tani
Kota Palu				
Berat	-	10	19	475
Sedang	3	7	12	300
Ringan	4	15	28	700
Kabupaten Sigi				
Berat	5	13	21	503
Sedang	3	4	6	152
Ringan	5	25	193	4.855
Kabupaten Donggala				
Berat	1	7	9	89
Sedang	1	1	12	279
Ringan	-	-	-	-

Sumber: BPTP Sulawesi Tengah, 2019

Kabupaten Sigi yang pada umumnya mengalami kerusakan berat hingga ringan pada lahan sawah sebesar 19,15 hektar dari jumlah total untuk usahatani padi dan jagung sebelum terjadi bencana sebesar 90,40 hektar. Pasca gempa bumi dan likuifaksi di Kabupaten Sigi tidak melakukan aktivitas usaha tani sebesar 134,55 hektar, hal ini disebabkan karena selain mengalami kerusakan berat juga pada lahan yang mengalami tingkat kerusakan sedang hingga ringan pun tidak digunakan untuk menanam jenis hortikultura karena rusaknya irigasi yang mengakibatkan kekeringan tanpa adanya supply air untuk kebutuhan usaha tani tersebut (Tabel 10). Begitu pula dengan Kabupaten Donggala yang pada umumnya mengalami kerusakan lahan sawah pasca gempa bumi dan likuifaksi yang menyebabkan berkurang bahkan hilangnya aktivitas usahatani pasca bencana alam.

TABEL 11. PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN BERDASARKAN USAHA TANI YANG DILAKUKAN RUMAHTANGGA PETANI SETELAH GEMPA BUMI, LIKUEFAKSI, DAN TSUNAMI DI WILAYAH KOTA PALU, KABUPATEN SIGI, DAN KABUPATEN DONGGALA - SULAWESI TENGAH

Jenis Usaha Tani	Sebelum Bencana (Ha)	Sesudah Bencana (Ha)
Kota Palu		
Padi	225,15	0
Jagung	122,75	0
Hortikultura	121,40	4,00
Kabupaten Sigi		
Padi	81,40	13,50
Jagung	9,00	5,65
Hortikultura	134,55	0
Kabupaten Donggala		
Padi	62,00	3,00
Jagung	57,75	9,00
Hortikultura	51,75	9,25
Cengkeh	17,50	14,50
Kakao	9,50	9,50
Jagung	1,00	0
Tak Dimanfaatkan	0	198,50

Sumber: BPTP Sulawesi Tengah, 2019

Rumah tangga petani sebagai pemilik maupun penggarap sawah pasca bencana alam tidak sedikit telah beralih menjadi buruh padat karya atau buruh bangunan atau tukang, beternak, dan mengumpulkan kelapa. Hal ini terjadi karena pada rumah tangga petani yang lahan sawahnya berkurang bahkan hilang dan selama ini menjadi sumber/mata pencaharian utama yang mengakibatkan tidak dapat beraktivitas di usahataninnya. Bagi rumah tangga petani yang masih memiliki lahan sawah juga tidak memiliki modal yang digunakan untuk melakukan kembali usahataninya. Rumahtangga petani berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan aktivitas kerja di non pertanian, namun juga tetap menjadi pekerja pada kegiatan pertanian

terutama saat musim sibuk pada kegiatan usahanya. Adanya perubahan harga input atau output, upah tenaga kerja, luas kepemilikan lahan rumah tangga diduga akan berpengaruh langsung pada perilaku ekonomi rumah tangga petani untuk menghasilkan pendapatan (Timmer & de Vries, 2009). Rumah tangga petani sebagai penyedia tenaga kerja akan mengalokasikan waktu pada berbagai kegiatan produksi dan *leisure* dalam rumah tangga. Keputusan rumah tangga petani dalam mengalokasikan waktu kerjanya, selain pada kegiatan usaha tani (*on farm* dan *off farm*) juga kegiatan non pertanian (*non farm*). Anggota rumah tangga dalam suatu rumah tangga pertanian biasanya bekerja bersama-sama dalam suatu kegiatan usaha tani. Hal ini merupakan keputusan yang rasional dan konsisten dengan tujuan peningkatan pendapatan rumah tangga dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut.

TABEL 12. PERUBAHAN RERATA PENDAPATAN RUMAHTANGGA PETANI SETELAH GEMPA BUMI, LIKUEFAKSI, DAN TSUNAMI DI WILAYAH KOTA PALU, KABUPATEN SIGI, DAN KABUPATEN DONGGALA – SULAWESI TENGAH

Jenis Usaha Tani	Rerata Pendapatan per Bulan Sebelum Bencana (Rp)	Rerata Pendapatan per Bulan Setelah Bencana (Rp)
Kota Palu		
Padi	3.400.000	-
Jagung	2.500.000	-
Hortikultura	2.800.000	5.872.000
Kabupaten Sigi		
Padi	3.600.000	500.000
Jagung	2.300.000	-
Hortikultura	3.300.000	-

Jenis Usaha Tani	Rerata Pendapatan per Bulan Sebelum Bencana (Rp)	Rerata Pendapatan per Bulan Setelah Bencana (Rp)
Kabupaten Donggala		
Padi	5.994.469	3.529.757
Kelapa	4.367.373	3.156.978
Hortikultura	0	23.302.070
Cengkeh	44.700.000	41.774.801
Kakao	11.787.242	24.220.213
Jagung	2.851.955	0

Sumber: BPTP Sulawesi Tengah, 2019

Gempa bumi, liquifaksi, dan tsunami telah memporak porandakan di beberapa wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Pasigala). Hal ini berdampak pada perubahan lahan-lahan pertanian terutama lahan sawah dengan tingkat kerusakan berat seluas 583,17 Hektar, sedang seluas 993,27 Hektar, dan ringan seluas 5.831,45 Hektar. Tsunami mampu mempengaruhi perubahan sifat kimia tanah, salah satunya meningkatnya kadar bahan organik tanah seperti yang terjadi pada contoh tanah di Kabupaten Donggala lebih tinggi dari pada contoh tanah dari Kabupaten Sigi, selain perubahan nilai karakteristik kimia tanah, terdapat perubahan karakteristik fisika tanah seperti tekstur yang juga berdampak kepada perubahan berat volume tanah sehingga kemampuan tanah meloloskan air juga menurun seiring meningkatnya berat *volume* tanah. Perubahan sosial ekonomi rumahtangga petani yang terdampak di Kota Palu sebesar 1.475 anggota kelompok tani dari 59 kelompok tani, Kabupaten Sigi 5.510 anggota kelompok tani dari 220 kelompok tani dan Kabupaten Donggala sebesar 368 anggota kelompok tani dari 21 kelompok tani mengalami penurunan aktifitas usaha tani (*on farm* dan *off farm*) dan rata-rata pendapatan per bulan, sehingga banyak yang beralih kerja pada sektor non pertanian (*non farm*) seperti: buruh padat karya, tukang dan buruh bangunan.

Perlunya dilakukan pemulihan ekonomi masyarakat terutama pada rumahtangga petani terdampak bencana alam melalui program jangka pendek dengan melakukan alternatif inovasi teknologi pertanian berdasarkan kebutuhan petani yang sesuai dengan kondisi lahan pasca gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala yaitu: (1) Pemanfaatan lahan huntara dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan pemeliharaan Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB); (2) Optimalisasi lahan pertanian terdampak ringan dan sedang melalui pengembangan komoditas tanaman adaptif pada lahan kering iklim kering, dan Integrasi sumur dangkal dengan sistem irigasi yang efisien.

3.3.3. PELESTARIAN LINGKUNGAN

3.3.3.1. LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN TANE, TAPE, DAN TAKE

Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin dalam pada beberapa dekade yang akan datang. Indikasinya antara lain tutupan hutan primer yang semakin menyusut dan diproyeksikan hanya akan tersisa sekitar 18,4% dari luas lahan total nasional (189,6 juta ha) di tahun 2045. Penyusutan tutupan hutan tersebut diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Jika kecenderungan itu tidak berubah, diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045 selain itu kerusakan tutupan hutan berperan besar dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Tahun 2000, kontribusi emisi sektor kehutanan (AFOLU, termasuk kebakaran gambut) mencapai sekitar 600,570 MTon CO₂e meningkat menjadi 752,135 MTon CO₂e pada 2016 atau sekitar 52% dari total emisi nasional pada 2016. Pemerintah telah berupaya menurunkan emisi GRK terutama melalui pencegahan kebakaran lahan dan hutan, reforestasi dan percepatan perhutanan sosial. Upaya ini telah berkontribusi menurunkan emisi sekitar 132,256 MTon CO₂e pada 2016. Selain itu,

pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui kebijakan perlindungan dan pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan antara lain moratorium perijinan perkebunan kelapa sawit (Inpres 8/2018), melanjutkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, melakukan restorasi lahan gambut, dan mengembangkan berbagai standar usaha berbasis lahan berkelanjutan.

Berbagai upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup termasuk tutupan hutan juga dilakukan oleh pemerintah daerah. The Asia Foundation (TAF) bersama jaringan masyarakat sipil mempromosikan EFT melalui 3 skema yaitu Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE).

TABEL 13. INSIASI TRANSFER FISKAL BERBASIS EKOLOGI DI INDONESIA

Inisiator	RCCCUI	BIOFIN - UNDP	TAF dan Jaringan Masyarakat Sipil
Skema transfer fiskal	Berbasis kinerja (performance-based) terhadap daerah yang memiliki luas tutupan hutan yang besar (daerah kaya hutan)	Berbasis kinerja kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Berbasis kinerja kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan ekologi termasuk menjaga luas tutupan hutan.
Sektor	Kehutanan	Keanekaragaman hayati	Kehutanan dan lingkungan hidup
Instrumen pengalokasian	DAU	DID	DID dan DPL (TANE), Bantuan Keuangan Provinsi (TAPE) dan Bantuan Keuangan Kabupaten/ADD (TAKE)

Sumber data: Asia Foundation, 2019. NASKAH KEBIJAKAN Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE DAN TANE

TABEL 14. KERANGKA REGULASI PENGEMBANGAN EFT

Skema EFT	Kerangka Regulasi Fiskal	Kerangka Regulasi Ekologi
TAPE	Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 45 dan 67 mengenai bantuan keuangan.	Artikel 5 Kesepakatan Paris sebagaimana telah diratifikasi dalam UU No. 16 Tahun 2016.
TAKE	Selain ketentuan di atas, ditambah ketentuan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa (Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan adanya kebijakan anggaran berbasis lingkungan hidup di APBN dan APBD. khususnya: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 42 ayat (2) huruf c mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam bentuk insentif dan disinsentif. • Pasal 43 ayat (3) huruf h menjelaskan lebih lanjut bahwa insentif diterapkan antara lain dalam bentuk “sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. • Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah beserta DPR/DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
TANE	Untuk saat ini didasarkan pada UU APBN terkait dengan pengalokasian DID. Ke depan, regulasi mengenai TANE dapat merujuk kepada ketentuan mengenai Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) yaitu skema transfer dari pusat ke daerah berbasis indikator ekologi sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan pada suatu konferensi di Jakarta, Agustus 2019.	

Sumber: Asia Foundation, 2019. NASKAH KEBIJAKAN Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE DAN TANE

3.3.3.2. INISIATIF TAPE, TANE, TAKE DALAM STRUKTUR TRANSFER FISKAL

Skema EFT yang dikembangkan oleh TAF dan jaringan masyarakat sipil secara umum merupakan transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) kepada pemerintah di bawahnya (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) dalam yurisdiksi yang sama berdasarkan kewenangan dan kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup.

Skema EFT pada tingkat nasional (TANE) dirancang sebagai bagian dari Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD) melalui skema DID dan DPL dengan cara menambah kriteria dan indikator ekologi pada kriteria DID dan DPL. Sedangkan EFT pada tingkat provinsi (TAPE) dirancang sebagai bagian dari transfer bantuan keuangan provinsi dan EFT pada tingkat kabupaten (TAKE) menjadi bagian dari bantuan keuangan kabupaten yang bersifat wajib yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemilihan skema TAPE dan TAKE didasarkan pada pertimbangan:

1. Instrumen fiskal dalam skema TAPE dan TAKE pada prinsipnya tidak menambah besaran bantuan keuangan oleh Pemerintah Provinsi dan ADD oleh Pemerintah Kabupaten yang sudah ditetapkan tetapi lebih mereformulasi mekanisme pengalokasian.
2. Pengelolaan urusan kehutanan dan lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan daerah dan desa.
3. Sebagai manifestasi komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan hutan, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
4. Pemerintah daerah memiliki diskresi fiskal dalam pengelolaan bantuan keuangan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
5. Skema TAPE dan TAKE akan memperkuat peran pemerintah provinsi dan kabupaten dalam melakukan supervisi dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3.3.3.3. VARIASI FORMULA TAPE DAN TAKE

Sebagai skema insentif, TAPE dan TAKE (termasuk TANE) membutuhkan indikator-indikator yang dapat menunjukkan kinerja suatu pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa) dalam melindungi lingkungannya. Indikator ini perlu tersedia pada

tiap tingkat pemerintahan daerah dan diperbaharui setiap tahunnya, sehingga pengukuran kinerja masing-masing level pemerintahan daerah dapat diukur. Tentunya, semakin sederhana indikator yang digunakan, semakin mudah penghitungan kinerja pemerintahan daerah yang bisa dilakukan.

Dalam kasus penyusunan indikator TAPE, dilakukan oleh tim pemerintah provinsi (umumnya dikoordinasikan oleh BAPPEDA) dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyepakati indikator yang digunakan. TAF dan jaringan masyarakat sipil mengidentifikasi ada 2 model penyusunan indikator yang bisa dipilih oleh pemerintah provinsi: pertama, *single* data sebagai indikator yakni TAPE menggunakan hanya satu data yang dimiliki atau disusun oleh pemerintah misalnya data tutupan hutan atau indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH -bila ada data hingga di tingkat kabupaten/kota); kedua, *multiple* data sebagai indikator TAPE yakni penyusunan indeks TAPE disusun berdasarkan data-data yang beragam dan diberi nilai bobot tersendiri.

3.4. POTENSI SOSIAL-BUDAYA

3.4.1. PENINGKATAN KEWASPADAAN KONFLIK

3.4.1.1. PENGERTIAN DAN BENTUK KONFLIK SOSIAL

Konflik merupakan gejala sosial yang sering hadir dalam kehidupan sosial sehingga bersifat inheren. Artinya konflik bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial.

Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Dengan demikian konflik dapat diartikan dengan percekocokan, perselisihan

dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas (Roma Tressa, 2015).

Menurut Soerjono (1992), konflik sosial dapat bagi menjadi lima bentuk yaitu:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya;
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras;
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial;
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok; dan
5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.

Ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik sosial. Pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kedua, teori negosiasi konflik. Teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Ketiga, teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Keempat, teori identitas.

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak selesai. Kelima, teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi antarberbagai budaya yang berbeda. Keenam, teori transformasi konflik yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah masalah sosial, budaya, dan ekonomi (Fisher, 2000). Sementara itu, menurut Purwasito (2003), ada tiga hal yang biasa melatarbelakangi munculnya disinteraksi antara kelompok mayoritas dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas, yaitu: (1) prasangka historis, (2) diskriminasi dan (3) perasaan superioritas in-group feeling yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (out-group).

3.4.1.2. POTENSI KONFLIK KABUPATEN SIGI

Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang dimekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008. Kabupaten ini memiliki 15 Kecamatan, 160 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk 230.000 jiwa (BPS, 2021). Penduduk asli Kabupaten Sigi ialah suku Kaili. Suku Kaili ini terdiri atas sub-sub suku dan bahasa serta menetap di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.

Berdasarkan aspek demografi dan sosial, Kabupaten Sigi memiliki keberagaman etnik dan agama. Beberapa etnis yang cukup besar populasinya adalah Kaili dan beberapa Suku Bali, Jawa dan Mandar. Sementara agama yang dianut adalah Islam dan Kristen dalam porsi yang relatif berimbang, Katolik, Hindu dan Budha. Beberapa kecamatan yang didominasi oleh Kristen adalah, Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, Lindu, Palolo, Marawola Barat dan Marawola. Selebihnya di dominasi oleh Islam. Dalam hal jumlah penduduk beragama Islam (sekitar 55%), Kristen (40%) dan sisanya (5%) penganut agama lainnya (Marzuki, 2008).

Secara geografis dan etnis, Kabupaten Sigi memiliki keunikan yang sangat kaya akan ornament historis, cultural, ekonomi dan sumber-sumber sosial lainnya. Salah satu keunikan yang sering terjadi adalah benturan antar kampung/desa/kelurahan, antar komunitas yang sulit dipahami secara rasional. Keunikan konflik yang terjadi antara lain yaitu 1) sama-sama beragama Islam dengan afiliasi keagamaan Al-Khairaat, 2) Sama-sama berlatarbelakang Suku Kaili dan dialek bahasa Kaili yang sama, yakni Ledo vs Ledo, Rai vs Rai, Ija vs Ija, Ado vs Ado dan lain sebagainya. 3) Sama-sama masyarakat petani yang hidup dari komoditas pertanian sawah dan kelapa. 4) Bahkan warga yang berkonflik masih terikat dalam ikatan keluarga dan kerabat yang dekat. Faktor pembedanya relatif kecil namun cenderung menjadi faktor utama yang melakukan proses-proses pematangan eskalasi konflik, dari konflik laten ke konflik terbuka (Roma, 2015).

Perkelahian antar kampung pernah terjadi pada tahun 2011. Uniknya konflik ini terjadi antar desa tetangga yang sebagian penduduknya masih memiliki hubungan kekerabatan. Berdasarkan data Kesbangpol Sigi tahun 2013, sejak tahun 2011 hingga Juni 2013 kasus konflik disertai kekerasan tertinggi di Sulawesi Tengah terjadi di Kabupaten Sigi yakni sebanyak 60 kasus dari 104 kasus yang berada di Sulawesi Tengah (Nawawi, dkk. 2012).

Berdasarkan catatan pihak Polda Sulteng sepanjang tahun 2012, terjadi 60 kasus bentrok di Kabupaten Sigi. Insiden tersebut terjadi di hampir seluruh kecamatan di Lembah Sigi dan melibatkan desa-desa tertentu yang memiliki sejarah konflik berkepanjangan. Data berikut ini menyajikan beberapa insiden yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Sementara pada awal tahun 2013 saja telah terjadi 5 kali kasus bentrok di Sigi. Berdasarkan data yang dihimpun, konflik terbesar terjadi antara Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat dengan Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru (Ilyas 2014). Pada 22 September 2018 terjadi bentrokan warga yang saling serang menggunakan senapan angin, senjata rakitan Dum-Dum, parang, dan saling lemparan batu

yang mengakibatkan korban jiwa di kecamatan Marawola (Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2018).

Menurut Tahmidi (2011), konflik yang berkepanjangan terjadi karena masyarakat sudah hampir melupakan nilai-nilai kearifan lokal sehingga ketika terjadi konflik tidak bersedia untuk melakukan musyawarah. Sementara itu, hasil penelitian Ilyas (2014) akar dan sumber konflik antar desa di Kabupaten Sigi dapat dikategorikan dalam beberapa isu berikut ini:

1. Historis permukiman dan kewilayahan untuk menuntut pengembalian lahan atau tanah.
2. Transformasi romantisme kekerasan anak-anak dan remaja yang berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya .
3. Masalah penegakan hukum.
4. Keterbatasan lapangan kerja dan angkatan kerja (tingginya tingkat pengangguran berakibat terbatasnya ruang masyarakat untuk berekspresi atau bekerja sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri. Pergeseran skala konflik kekerasan yang sifatnya personal menuju sifatnya komunal.
5. Keterbatasan ruang publik dan pembinaan generasi muda untuk kegiatan yang lebih produktif.
6. Bias dan distorsi informasi (kesalahan dalam menerjemahkan informasi yang diterima).

Konflik sosial dapat mengakibatkan pembangunan menjadi terkendala di segala bidang. Oleh sebab itu, antisipasi, pencegahan dan resolusi konflik harus terus menerus dilakukan dengan memperhatikan berbagai isu/permasalahan sebagaimana tersebut di atas; antara lain: Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam, penyediaan ruang publik bagi masyarakat terutama pemuda untuk pengembangan diri dan peningkatan produktivitas, merefitalisasi lembaga-lembaga adat dan Lembaga-lembaga sosial untuk dikembalikan fungsinya dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan

konflik, serta memberikan pencerahan terhadap nilai-nilai perbedaan dan mengangkat Kembali kearifan lokal di tengah masyarakat.

3.4.2. PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL

3.4.2.1. SINTUVU SEBAGAI BUDAYA GOTONG ROYONG

Istilah *sintuvu* dalam masyarakat Kaili memiliki sinonim atau padanan dengan kata *pakasongu*. Pengertian *pakasongu* dipahami dalam tiga istilah, yaitu *pakasongu*, *nompakasongu*, dan *mompakasongu*. *Pakasongu* merupakan kata kerja, *nompakasongu* merupakan kata sifat, dan *mompakasongu* merupakan sebuah prinsip atau simbol. Kata *pakasongu* yang berasal dari kata dasar *songu* mengandung makna kegotongroyongan, persatuan dalam satu ikatan. *Pakasongu* artinya persatuan yang sudah mengikat sehingga memiliki konsekuensi normatif. *Sintuvu* atau *pakasongu* yang bermakna mengikat memiliki kedudukan sebagai dasar perilaku bagi masyarakat Kaili yang dituangkan dalam hukum adat. Prinsip gotong royong dalam masyarakat Kaili dipahami sebagai aktivitas masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah (*libu*) untuk menyelesaikan masalah publik secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Proses *sintuvu* dalam masyarakat Kaili didahului dengan musyawarah (*libu*) untuk mendapatkan kemufakatan, dari hasil kemufakatan tersebut kemudian dikerjakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Kearifan-kearifan lokal masyarakat Kaili yang memiliki korelasi dengan budaya kebersamaan *sintuvu* diantaranya *nosarara nosabatutu*, *ada nosibolai*, *libu ntodea*, dan *tonda talusi*. Kearifan-kearifan dalam budaya Kaili tersebut mempunyai korelasi dengan konsep *sintuvu* sebagai budaya gotong royong dalam masyarakat Kaili.

3.4.2.2. NOSARARA NOSABATUTU (PRINSIP KEKELUARGAAN DAN PERSATUAN)

Prinsip nosarara nosabatutu mengajarkan tentang kekeluargaan (nosarara) dan persatuan (nosabatutu) untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nosarara nosabatutu sebagai prinsip kekeluargaan dan persatuan masyarakat Kaili mengandung nilai-nilai vital yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip kekeluargaan pada konsep nosarara nosabatutu juga mengindikasikan adanya persepsi sentimental spiritual dan preferensi spiritual. Salah satu contoh persepsi sentimental dan preferensi spiritual dalam konsep nosarara yaitu prinsip mencintai orang lain seperti saudara sendiri yang tercermin dalam ungkapan “sararata le atau sararata ia” yang artinya saudara kita ‘dia’. Sedangkan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ajaran nosabatutu masyarakat Kaili, sebagaimana pendapat Haliadi yaitu rasa senasib sepenanggungan, menghargai dan menjaga kekayaan bersama untuk kepentingan bersama, menjaga kerahasiaan, dan kehati-hatian atau kewaspadaan (Haliadi 2006).

3.4.2.3. NOSIBOLAI (PRINSIP KETERBUKAAN)

Salah satu bentuk keterbukaan masyarakat Kaili ditunjukkan dalam tradisi kawin mawin antaretnik disebut adanosibolai. Tradisi kawin mawin antar etnik tersebut awalnya dilakukan oleh raja dan bangsawan di lingkungan kerajaan kemudian diikuti oleh kalangan masyarakat biasa. Tradisi ada nosibolai pada awalnya merupakan usaha bangsawan di masa lalu untuk menyebarkan keturunannya ke daerah lain dengan cara perkawinan (Melalatoa 1995). Tradisi ini masih berlaku sampai dengan sekarang, baik di lingkungan masyarakat keturunan raja dan bangsawan (magau dan madika) maupun masyarakat biasa (ntodea).

3.4.2.4. TONDA TALUSI (PRINSIP HARMONI)

Tonda talusi merupakan kearifan lokal masyarakat Kaili dalam mewujudkan harmonisasi sebagaimana upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik. Tonda talusi dalam konteks kebersamaan masyarakat Kaili merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar konsep sintuvu untuk mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari tonda talusi adalah kekeluargaan, musyawarah, kerja sama, dan harmoni.

Tonda talusi adalah filosofi masyarakat Kaili yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhan. Tonda talusi artinya tiga penyangga (tungku) kehidupan masyarakat Kaili. Prinsip-prinsip kebersamaan dalam falsafah Tonda Talusi, meliputi 3 pilar kehidupan masyarakat Kaili yang dilandasi nilai-nilai kebaikan, yaitu: 1) Matuvu Mosipeili artinya baku lihat, 2) Matuvu Mosiepe artinya baku dengar, 3) Matuvu Mosimpotove artinya baku sayang. Tonda Talusi menggambarkan tiga tungku penyangga kehidupan dalam masyarakat Kaili.

Konsep tonda talusi dalam perkembangannya dimaknai sebagai hubungan kerja sama dalam masyarakat antara pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai representasi dari harmonisasi hubungan manusia dengan alam semesta, sesama manusia, dan Tuhan. Tonda Talusi merupakan pendekatan untuk mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat Kaili melalui tiga pilar tersebut agar masyarakat senantiasa merasa tenteram dan nyaman hidup di tanah Kaili. Tonda talusi merupakan warisan pranata sosial yang dibangun para leluhur sejak ratusan tahun silam sebagai kearifan To Kaili. Tonda talusi sebagai tiga pilar penyangga kehidupan dalam masyarakat Kaili sekarang ini pendekatannya menggunakan beberapa unsur yaitu: 1) Tonda (tungku) yang pertama melibatkan Pemerintah Daerah, Polri, dan TNI; 2) Tonda (tungku) kedua melibatkan tokoh adat; 3) Tonda (tungku) ketiga melibatkan tokoh agama. Pola tersebut sangat efektif digunakan dalam menangkal atau melakukan deteksi dini pada lingkungan terkecil dalam

masyarakat yaitu RT, RW, dan kelurahan sebagai tindakan preventif dan preventif dalam mengenal orang-orang di lingkungan tersebut. Dengan mengenal nama dan domisili warga masing-masing diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman warga masyarakat serta menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan.

3.4.3. PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DAN MILENIAL

Tujuan pembangunan di bidang sosial dan budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Sasaran umum yang akan dicapai dalam subbab ini adalah, meningkatnya peran sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, dan meningkatnya partisipasi aktif kaum milenial. Bahasan tentang sosial budaya dalam sub bab ini membahas tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan milenial guna mendukung pembangunan di Kabupaten Sigi.

3.4.3.1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Keberadaan perempuan dalam keluarga maupun dalam masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat peran perempuan yang cukup strategis bila dikaitkan dengan pembangunan. Peran perempuan jadi kunci kehidupan keluarga Indonesia secara umum. Sebagai seorang ibu dan istri, perempuan berperan sebagai manajer keluarga yang memastikan seluruh anggota keluarganya dalam keadaan yang baik dan sehat. Kualitas keluarga-keluarga kita itu banyak ditentukan oleh kualitas perempuan atau ibu. Dengan memberikan pemberdayaan perempuan, maka boleh dibilang lebih dari separuh persoalan keluarga terselesaikan

Istilah pengembangan atau pemberdayaan Masyarakat secara teoretik bersumber dari sebuah disiplin dalam khasanah sosiologi terapan, yaitu yang disebut dengan istilah *Community Development* (CD). Istilah CD saat ini telah menjadi konsep pembangunan yang sangat populer,

yang digunakan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dengan makna dan konteks yang sangat beragam. Banyak institusi (instansi), baik pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk perguruan tinggi, melakukan CD sebagai prakarsa, atau aktivitas, yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin (Anharudin, 2010).

Makna lain pemberdayaan adalah proses perubahan pribadi (individual), dari persepsi sebagai objek berubah menjadi pelaku perubahan. Pemberdayaan kemudian menjadi pendekatan alternatif terhadap pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan dari atas (*top down*). Pemberdayaan menempatkan masyarakat miskin dan tertinggal sebagai prioritas perlakuan, dengan memberikan ruang partisipasi yang besar kepada mereka. Dengan demikian pemberdayaan pada dasarnya merupakan model pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, dan merumuskan kebutuhan masyarakat dari perspektif masyarakat sendiri, bukan dari perspektif para elit (teoritis) pembangunan. Pemberdayaan juga tidak hanya memprioritaskan pengembangan ekonomi, tetapi juga pengembangan sosial-budaya, dan lingkungan.

Sebagian besar perempuan berdiam di perdesaan, daerah tertinggal dan memiliki pendidikan yang rendah. Demikian pula halnya di Kabupaten Sigi yang merupakan daerah tertinggal, jumlah perempuan 116.721 ribu jiwa atau 48,75% dari jumlah penduduk Kabupaten Sigi (239.421 ribu jiwa). Kabupaten Sigi merupakan daerah tertinggal dengan tingkat kemiskinan ketiga terbesar di Sulawesi Tengah, yaitu berturut-turut dengan jumlah penduduk miskin tahun 2020 adalah: (1) Kabupaten Parigi Montong 81.36 ribu, (2) Kabupaten Donggala 55.83 ribu, dan (3) Kabupaten Sigi 30.82 ribu.

Sumber daya perempuan dengan jumlah yang cukup besar, akan menjadi beban jika tidak dimaksimalkan peran dan fungsinya dalam segala lini pembangunan. Sebaliknya, akan menjadi suatu sumber daya

yang besar manfaatnya jika mampu di arahkan menjadi insan yang berdayaguna tinggi melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di semua bidang pembangunan. Dengan pemberdayaan perempuan dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Terkait dengan adat budaya di Kabupaten Sigi yang terdiri dari 4 (empat) unsur yang berkembang di masyarakat terdiri dari: (1) budaya gotong royong (Sintuvu), (2) prinsip kekeluargaan dan persatuan (Nosarara nosabatutu), (3) prinsip keterbukaan (Nosibolai), dan (4) prinsip harmoni (Tonda talusi), perlu dikembangkan dalam pemeliharaan, dan pelestarian. Pelestarian budaya tersebut perlu adanya keterlibatan seluruh unsur masyarakat terutama melibatkan perempuan secara aktif karena telah banyak bukti bahwa perempuan telah mampu mengatasi masalah sosial budaya, ekonomi dan lingkungan di sekitarnya. Hal ini mengingat selama ini perempuan kurang diikuti sertakan dalam kegiatan adat setempat, baik itu dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Keterlibatan dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Sigi, diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Sehubungan dengan itu maka banyak hal yang dapat dilakukan perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan status daerah Kabupaten Sigi dari tingkat kemiskinan. Mengingat pasca bencana pendapatan masyarakat di Kabupaten Sigi jatuh, yang berdampak terhadap kehidupan keluarga dan meningkatnya angka kemiskinan.

Data BPTP Sulawesi Tengah, 2019 menggambarkan bahwa adanya alih fungsi lahan pasca bencana berdampak terhadap pendapatan petani seperti halnya yang terlihat pada tabel berikut.

TABEL 15. PENDAPATAN PETANI SEBELUM DAN SETELAH GEMPA DI KABUPATEN SIGI

Jenis Usahatani	Rerata pendapatan perBulan Sebelum Bencana (Rp)	Rerata Pendapatan per Bulan Setelah Bencana (Rp)
Pagi	3.600.000	500.000
Jagung	2.300.000	-
Hortikultura	3.300.000	-

Sumber: BPTP Sulawesi Tengah, 2019

Tabel di atas menunjukkan betapa terpuruknya pendapatan petani pada saat ini pasca bencana. Perlu ditumbuhkan kembali keyakinan bahwa dengan usaha yang optimal, kondisi ini dapat dilalui dengan persayaratan seluruh elemen masyarakat saling bahu membahu bekerjasama membangun dan menata kembali kehidupannya seperti yang terdapat dalam budaya mereka yaitu (Sintuvu, Nosarara nosabatutu, Nosibolai, dan Tonda talusi). Keterlibatan perempuan, kaum muda, aparat, tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan.

Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, dapat membentuk sikap dan perilaku menjadi sadar berbuat yang berkualitas. Ini berarti perempuan tidak hanya mau bekerja keras tetapi juga harus dapat bekerja secara cerdas dan ikhlas dalam membangun kembali Kabupaten Sigi.

Bila perempuan dilibatkan dalam pembangunan, ini berarti seluruh keluarga akan turut menanganinya, karena perempuan akan mengajarkan dan menularkannya. Bila perempuannya aktif dalam pengelolaan potensi lokal (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan), maka akan terlihat kondisi yang lebih harmoni. Hal ini mendukung pemulihan Kabupaten Sigi pasca bencana, mengingat hingga saat ini banyak daerah yang terkena bencana belum disentuh perbaikan dan mereka masih bertahan

di hunian sementara. Untuk itulah diperlukan semangat bersama untuk membangun kembali Kabupaten Sigi.

Perempuan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menjadi agenda Kabupaten Sigi yang harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Jika perempuan tidak tahu dan tidak memahami, atau kurang pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan potensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, merupakan kerugian dan akan berdampak negatif terhadap kondisi daerah.

Pemanfaatan kemampuan perempuan dan peningkatan partisipasi mereka dalam perekonomian dapat menjadi kebijakan ekonomi yang cerdas untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Sigi khususnya. Penekanan pada keterampilan dan penciptaan pekerjaan yang memanfaatkan angkatan kerja perempuan di Kabupaten Sigi bukan hanya akan mendukung pertumbuhan jangka pendek yang lebih besar, melainkan juga akan memastikan bahwa investasi untuk modal manusia direalisasikan sepenuhnya.

Oleh karena itu strategi pemberdayaan perempuan penting diposisikan di tempat utama dalam setiap strategi pembangunan agar keterpurukan pasca bencana dapat segera diatasi. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kapasitas perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan (ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan) merupakan suatu yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak dan dikaitkan dengan 4 (empat) unsur adat budaya mereka.

Meskipun peraturan tentang kesiapan kebencanaan telah ada, namun kesiapan pelaksanaannya di lapang belum ada dan belum semua masyarakat mengetahuinya. Untuk itu kunci pemberdayaan perempuan dalam pencegahan bencana yang diperlukan adalah : (1). Sosialisasi tentang kebencanaan, (2). Pemasangan alat *early warning system* (EWS)

terutama di tempat-tempat rawan bencana, (3). Pelatihan menghadapi bencana. Sementara itu Pemerintah Daerah membangun jalur-jalur evakuasi dan membangun rumah tahan gempa.

Melalui pemberdayaan, beberapa daerah telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Namun masih banyak perempuan yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan baik di perkotaan terlebih di perdesaan karena budaya partialisme yang bias gender, sehingga program pemberdayaan lebih menysasar pada kaum laki-laki.

Oleh karena itu strategi pemberdayaan perempuan penting diposisikan di tempat utama dalam setiap strategi pembangunan. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kapasitas perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan merupakan suatu yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, agar sumber daya manusia yang cukup banyak jumlahnya di dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan yang ramah lingkungan. Keterlibatan perempuan dalam berbagai pembangunan yang dikaitkan pula dengan unsur budaya lokal (Sintuvu, Nosarara nosabatutu, Nosibolai, dan Tonda talusi) dapat merubah kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera.

3.4.3.2. PEMBERDAYAAN MILENIAL

Generasi milenial merupakan modal utama dalam fenomena bonus demografi. Potensi generasi milenial yang dapat dimaksimalkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran generasi milenial yang merata tanpa adanya kesenjangan gender juga akan mengoptimalkan manfaat dan potensi yang ada.

Generasi milenial adalah masyarakat sosial yang melek dan adaptable pada teknologi. Mereka cenderung suka memanfaatkan teknologi untuk mempermudah segala aktivitas, tak terkecuali aktivitas belanja (Budi, 2020). Selanjutnya dikatakan bahwa Generasi millennial juga memiliki

sifat yang lebih toleran terhadap sesamanya. Hal ini dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin cepat, di mana anak muda zaman saat ini dapat berinteraksi dengan manusia dari berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, globalisasi membuat generasi millennial menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan, wawasan mereka terhadap keberagaman pun menjadi lebih luas sehingga timbul sifat toleran yang cukup tinggi dari generasi ini.

Besarnya jumlah penduduk milenial saat ini dapat menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam pembangunan Indonesia kedepan, terutama bagi target standar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Jumlah milenial di Kabupaten Sigi sendiri sebanyak 55.353 ribu atau 23,12 persen dari jumlah penduduk, merupakan potensi dalam pembangunan. Dikhawatirkan bila jumlah kaum milenial Kabupaten Sigi tidak diberdayakan dapat menambah konflik yang akan terjadi dan makin terpuruknya pembangunan.

Selama ini konflik yang terjadi diantara kaum milenial Kabupaten Sigi lebih diakibatkan karena beragamnya suku, ras, agama, dan kondisi ekonomi, serta masih banyaknya milenial yang suka mimun miras, sehingga mudah menimbulkan ketersinggungan diantara mereka hanya karena hal-hal kecil, seperti bersenggolan di jalan dsb.

Berdasarkan data sakernas tahun 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Sigi sebesar 66,86 persen yang berarti dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun keatas) sekitar 67 orang termasuk angkatan kerja. Angka TPAK sendiri menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT), pada tahun 2015 TPT Kabupaten Sigi sebesar 5,74 persen yang artinya dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat 6 orang yang berstatus pengangguran. Diduga dengan dampak pandemi Covid-19 dan bencana yang melanda Kabupaten Sigi, jumlah pengangguran bertambah, kemiskinan meningkat dan kenakalan/konflik remaja meningkat pula.

Selain permasalahan penambahan jumlah penduduk usia kerja permasalahan tingkat pendidikan tenaga kerja dan persebaran tenaga kerja juga menjadi masalah tersendiri dalam ketenagakerjaan di Kabupaten Sigi. Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ialah produktivitas tenaga kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.

Pengertian ini diyakini oleh suatu teori yang menamakan dirinya Teori Human Capital. Teori Human Capital menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Teori ini merasa yakin bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari produktivitas.

Milenial erat kaitannya dengan internet dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Akses generasi milenial terhadap teknologi erat kaitannya dengan peran generasi milenial dalam perekonomian dan partisipasi generasi milenial dalam bidang politik merupakan potensi pembangunan di bidang ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Namun demikian, data menunjukkan bahwa pemanfaatan internet di Kabupaten Sigi masih minim (BPS, 2021). Berdasarkan hasil Listing SE2016, sebagian besar usaha tidak memanfaatkan internet dalam menjalankan usahanya maupun menggunakan internet seperti facebook atau media sosial lainnya yang tidak berkaitan dengan usahanya yaitu sebesar 98,16 persen. Sedangkan yang memanfaatkan media internet untuk menjual barang dan jasa hanya sebesar 0,90 persen dan 0,94 persen menggunakan media internet tidak untuk menjual barang dan jasa.

Didalam dunia yang serba digital ini, membutuhkan fasilitas internet untuk dijadikan sebagai media komunikasi untuk mencari informasi perkembangan dan inovasi-inovasi baru yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan potensi sumber daya alam. Kabupaten Sigi yang memiliki potensi dalam pengembangan pertanian dan peternakan,

pengembangan wisata air panas, sebenarnya merupakan peluang bagi kaum milenial untuk berkreatifitas membangunnya.

Pengelolaan potensi sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi digital secara terpadu sangat tergantung pada potensi kawasan dan kemampuan masyarakatnya. Keunggulan komparatif berupa sumberdaya alam yang dimiliki desa, perlu diiringi dengan peningkatan keunggulan kompetitif yang diwujudkan melalui kreatifitas milenial dengan memanfaatkan teknologi digital yang semakin profesional. Perkembangan teknologi yang disertai dengan digitalisasinya dalam berbagai sektor tersebut dapat memberikan kesempatan bagi kaum milenial untuk terus meningkatkan kreatifitas, dan ide-ide mereka. Dengan adanya kreatifitas dan perkembangan teknologi digitalisasinya, akan semakin banyak mengemas paket menarik dalam pengelolaan potensi sumber daya alam.

Perlu dukungan berbagai pihak, terutama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan berbasis digital, serta pendampingan pada kaum milenial sebagai agen perubahan dalam pengelolaan potensi sumber daya yang ada.

Kaum milenial akan berpartisipasi dalam pembangunan apabila dirasa sesuai dengan passion atau keinginan mereka. Menurut Ife & Tesoriero, 2008. Masyarakat akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa hal tersebut dirasa penting, mendatangkan perubahan, partisipasinya dihargai dan didorong untuk berpartisipasi. Untuk itulah passion yang dimiliki milenial di Kabupaten Sigi dapat diarahkan pada pengembangan potensi yang belum dikelola dengan baik terutama pasca bencana.

Dalam konteks ini, milenial memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Milenial harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah

yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, dan menikmati hasilnya.

Terkait dengan kaum milenial yang umumnya lebih suka bekerja dengan kebebasan untuk berkreaitivitas, bekerja dengan fleksibilitas waktu dan juga bekerja secara tim, maka keterlibatannya dalam partisipasi pembangunan desa perlu ada penyesuaian lingkungan agar kaum milenial memiliki kebebasan berkreaitivitas, waktu kerja yang fleksibel, dan tim yang mendukung.

Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari kaum milenial terhadap pembangunan, maka milenial harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan termasuk pada tahapan perencanaan pembangunan. Dengan demikian diharapkan akan timbul suatu rasa tanggung jawab bersama seluruh masyarakat khususnya kaum milenial sebagai *agent of change* terhadap pembangunan terutama dalam pengelolaan Kabupaten Sigi yang rawan bencana, rawan konflik dan merupakan daerah tertinggal.

Pemerintah daerah harus terus melakukan pembinaan pada generasi milenial dan memberikan reward kepada mereka yang telah berkontribusi dalam membangun kembali Kabupaten Sigi dari keterpurukan. Kabupaten Sigi dengan potensi bencana, rawan konflik dan merupakan daerah tertinggal memerlukan tangan-tangan milenial yang mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik untuk membangun kembali Kabupaten Sigi dari stigma daerah rawan konflik dan daerah tertinggal.

Pemberdayaan milenial juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja milenial, mengembangkan kewirausahaan milenial, meningkatkan partisipasi lembaga kepemudaan dalam pembangunan ekonomi, memperluas kesempatan pemuda terdidik untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Sigi; mengembangkan jaringan kerjasama pemuda antardaerah, antarpropinsi dan antarbangsa, meningkatkan peran aktif milenial dalam penanggulangan masalah kriminalitas di kalangan pemuda.

Untuk meningkatkan penggunaan internet dan pengadaan jaringan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kominfo dan *stakeholder* terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana teknologi digital, agar makin tinggi minat milenial dalam membangun Kabupaten Sigi dengan memanfaatkan teknologi digital.

3.5. POTENSI EKONOMI

3.5.1. PRODUK UNGGULAN

Dalam konteks komoditas unggulan daerah atau suatu kawasan perlunya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/daerah agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi daerah adalah dengan mengidentifikasi komoditas/produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah/kawasan pada tiap-tiap sub sektor. Produk unggulan daerah/kawasan menggambarkan kemampuan untuk menghasilkan produk, menciptakan nilai tambah, memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat setempat, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya.

Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan /atau menembus pasar ekspor (Sударsono, 2010).

Kriteria produk unggul menurut Unkris Satya Wacana (2017), adalah komoditas yang memenuhi persyaratan kecukupan sumberdaya lokal, keterkaitan komoditas, posisi bersaing dan potensi bersaing. Dari kriteria ini dapat dikelompokkan komoditas sebagai berikut:

1. Komoditas potensial adalah komoditas daerah yang memiliki potensi untuk berkembang karena keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi misalnya karena kecukupan ketersediaan sumberdaya,

seperti bahan baku lokal, keterampilan sumberdaya lokal, teknologi produksi lokal serta sarana dan prasarana lainnya;

2. Komoditas andalan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain;
3. Komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di daerah lain. Keunggulan kompetitif demikian dapat terjadi karena efisiensi produksinya yang tinggi akibat posisi tawarnya yang tinggi baik terhadap pemasok, pembeli, serta daya saingnya yang tinggi terhadap pesaing, pendatang baru maupun barang substitusi.

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri, berdasarkan Surat Edaran Nomor 050.05/2910/III/BANDA tanggal 7 Desember 1999, ditentukan kriteria komoditas unggulan sebagai berikut:

1. Mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa;
2. Mempunyai daya saing tinggi di pasaran, baik ciri, kualitas maupun harga yang kompetitif serta jangkauan pemasaran yang luas, baik di dalam negeri maupun global;
3. Mempunyai ciri khas daerah karena melibatkan masyarakat banyak (tenaga kerja setempat);
4. Mempunyai jaminan dan kandungan bahan baku yang cukup banyak, stabil, dan berkelanjutan;
5. Difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, baik dalam kemasan maupun pengolahannya;
6. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan SDM masyarakat; dan

7. Ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat.

Sedang Daryanto dalam Shinta Widyaning Cipta, dkk. (2017) mengatakan bahwa komoditas unggulan jika mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. Komoditas unggulan tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata (signifikan) pada peningkatan produksi, pendapatan dan pengeluaran.
2. Mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lainnya di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi dan kualitas pelayanan.
3. Pengembangannya harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalnya keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas intensif, dan lain-lain.

Sementara itu, menurut Najiyati (2018) komoditas unggulan merupakan komoditas yang memiliki keunggulan berdasarkan pertimbangan fisik (kondisi tanah dan iklim), sosial ekonomi, maupun yuridis. Najiyati (2018) menyusun persyaratan untuk menentukan komoditas unggulan sebagai berikut.

1. Syarat Teknis
 - a. Sesuai dengan kondisi sumber daya alam di desa/ kawasan (seperti: tanah, iklim, air)
 - b. Pengembangannya menggunakan teknologi yang dapat dilaksanakan atau sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada.
 - c. Sesuai dengan ketersediaan bahan baku (industri)
 - d. Pengembangannya tidak merusak lingkungan
2. Syarat Sosial
 - a. Sesuai dengan aspirasi masyarakat/Bumdes

- b. Diusahakan oleh sebagian besar masyarakat/Bumdes atau menyerap banyak tenaga kerja; atau
 - c. Memungkinkan untuk diusahakan oleh banyak masyarakat/Bumdes atau menyerap banyak tenaga kerja
3. Syarat Ekonomi
- a. Memiliki peluang pasar yang besar dan kontinu /berkelanjutan
 - b. Menguntungkan
 - c. Layak diusahakan pada kondisi modal yang tersedia atau modal yang dapat diakses oleh masyarakat/Bumdes
4. Syarat Yuridis

Sesuai (tidak bertentangan) dengan kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah/kawasan, dan desa setempat seperti RPJMD dan regulasi di atasnya, RTRW, RPJMDes, dokumen perencanaan kawasan/Geopak/kawasan perdesaan.

Terkait dengan Kabupaten Sigi sebagai lokus penelitian, komoditas unggulan adalah Padi, jagung, kopi, kelapa dalam, ternak sapi, dan ayam, namun karena adanya kerusakan lahan akibat dari gempa bumi kondisinya mengalami perubahan yang signifikan. Lahan pertanian sawah berubah menjadi lahan tegalan yang dibiarkan tanpa diolah karena mengalami kerusakan yang berat yaitu ada penimbunan tanah dan tanah ambles (tanah mengalami penurunan).

Dalam konteks komoditas unggulan di Kabupaten Sigi dapat dibedakan menjadi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Untuk tanaman pangan yaitu padi dengan luas panen 14.427,68 Ha dengan produksi 64.949,47ton dan/atau 38.140,81ton setara beras. Untuk produksi jagung sebesar 56.173 ton. Untuk tanaman perkebunan adalah kopi dengan luas lahan 2.583 Ha, produksi 419,5ton dan kakao 27.705 Ha dengan produksi 19.224,4 ton, kelapa dalam 6.119 Ha produksi 2.516, sedangkan untuk peternakan adalah sapi dan kambing dengan populasi masing-masing 4.711 ekor dan 65.348 ekor. Sedangkan untuk jenis unggas yaitu ayam kampung dengan populasi

sebesar 226.315 ekor, dan ayam pedaging 79. 623 ekor (Kab. Sigi Dalam Angka, 2021).

Komoditas unggulan dan produknya dalam perkembangannya harus dikelola secara optimal dan profesional yang melibatkan berbagai pihak yang bergerak dalam matarantai pemasaran dari produk komoditas unggulan tersebut yang dikenal dengan istilah Agribisnis.

3.5.2. AGROBISNIS

Pengembangan potensi ekonomi perdesaan tidak terlepas dari agrobisnis atau tataniaga usaha tani. Apa yang dimaksud agrobisnis ini adalah bisnis berbasis pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik disektor hulu maupun hilir. Diperdesaan sebutan sektor hulu maupun hilir dipandang bahwa agrobisnis bekerja pada rantai sektor pertanian tanaman pangan.

Secara akademi agrobisnis dapat dikatakan mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Namun istilah agrobisnis di masyarakat umum sering kali ditekankan pada ketergantungan berbagai sektor dalam rantai produksi (tahap budidaya sampai tahap pemasaran).

Kegiatan budidaya merupakan inti agrobisnis, meskipun suatu perusahaan agribisnis tidak harus melakukan sendiri dalam kegiatannya. Apabila produk budidaya (hasil panen) dimanfaatkan oleh pengelola sendiri, kegiatan ini disebut pertanian subsisten, dan dapat dikatakan sebagai kegiatan agribisnis primitif. Dalam hal ini pemanfaatan hasil bumi dengan cara menjual hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan/keperluan keluarga sehari-hari. Dalam kontek kajian ini khususnya di Kabupaten Sigi sebagian besar masih dalam taraf agribisnis primitif, karena hasil produk komoditas unggulan sebagian besar masih untuk keperluan pangan keluarga sendiri dan sebagian kecil dijual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan yang lain.

Dalam perkembangan masa kini agrobisnis tidak hanya mencakup kepada industri makanan saja karena pemanfaatan produk pertanian telah berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan pangan, penyediaan energi dan sebagainya.

Agrobisnis mencakup tidak hanya budidaya tanaman, tetapi juga dapat bergerak di bidang peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sehingga secara umum agrobisnis dapat mencakup pertanian secara luas.

Terkait dengan lokasi studi peluang pengembangan agrobisnis cukup baik karena didukung oleh potensi cukup besar di masing-masing komoditas unggulan.

Pengembangan agrobisnis di kabupaten Sigi sudah menjadi kebijakan dalam pembangunan pertaniannya, di mana kebijakan pengembangan agribisnis sudah tertuang dalam Visi dan Misi kabupaten Sigi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pembangunan agribisnis di kabupaten Sigi, juga perlu memperhatikan semua aspek mulai dari hulu sampai hilir. Pertanian yang terintegrasi dan berkolaborasi yang mampu untuk maju untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal penting yang perlu diperhatikan tentang agribisnis di kabupaten sigi adalah pasar dari produk pertanian dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk produksi pertanian. Variabel tersebut sangat mempengaruhi harga produk pertanian yang sangat kompetitif di pasar.

Bicara tentang kegiatan agrobisnis tidak lepas dari agroindustri karena keduanya berkecimpung dalam kegiatan memanfaatkan hasil pertanian.

3.5.3. AGROINDUSTRI

Agroindustri secara umum dapat dikatakan sebagai kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Proses yang digunakan mencakup perubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik/kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi.

Produk Agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interelasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian. Dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri (pengolahan hasil pertanian) merupakan bagian dari lima subsistem agribisnis yang disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, sarana dan pembinaan. Oleh karena itu agroindustri mencakup Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP), Industri Peralatan dan Mesin Pertanian (IPMP) dan Industri Jasa Sektor Pertanian (IJSP).

Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. IPHP Tanaman Pangan, termasuk di dalamnya adalah bahan pangan kaya karbohidrat, palawija dan tanaman hortikultura;
2. IPHP Tanaman Perkebunan, meliputi tebu, kopi, teh, karet, kelapa, kelapa sawit, tembakau, cengkih, kakao, vanili, kayu manis dan lain-lain;
3. IPHP Tanaman Hasil Hutan, mencakup produk kayu olahan dan non kayu seperti damar, rotan, tengkawang dan hasil ikutan lainnya;

4. IPHP Perikanan, meliputi pengolahan dan penyimpanan ikan dan hasil laut segar, pengalengan dan pengolahan, serta hasil samping ikan dan laut;
5. IPHP Peternakan, mencakup pengolahan daging segar, susu, kulit, dan hasil samping lainnya.

TABEL 16. BEBERAPA PENERAPAN TEKNOLOGI UNTUK PRODUK AGROINDUSTRI

No.	Jenis Komoditas Unggulan	Teknologi yang diterapkan	Produk Akhir
1	Padi	Pengeringan dan Penggilingan	Beras
2	Jagung	Pengeringan dan Penggilingan	Tepung Jagung
3	Biji Kopi	Pengeringan dan Penggilingan	Kopi Bubuk
4	Kelapa	Pengeringan, pengempaan, hidrolisis, penyabunan, pemucatan (bleaching), penghilangan bau (deodorisasi)	Minyak Goreng
5	Biji Kakao	Fermentasi, pengeringan, penggilingan, pengempaan, formulasi	Coklat
6	Ayam	-	Daging Ayam

Sumber: Data Sekunder, 2021

Untuk Industri Peralatan dan Mesin Pertanian (IPMP) dibagi menjadi dua kegiatan sebagai berikut:

1. IPMP Budidaya Pertanian, yang mencakup alat dan mesin pengolahan lahan (cangkul, bajak, traktor dan lain sebagainya).
2. IPMP Pengolahan, yang meliputi alat dan mesin pengolahan berbagai komoditas pertanian, misalnya mesin perontok gabah, mesin penggilingan padi, mesin pengering dan lain sebagainya.

Industri Jasa Sektor Pertanian (IJSP) dibagi menjadi tiga kegiatan sebagai berikut:

1. IJSP Perdagangan, yang mencakup kegiatan pengangkutan, pengeemasan serta penyimpanan baik bahan baku maupun produk hasil industri pengolahan pertanian.

2. IJSP Konsultasi, meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan mutu serta evaluasi dan penilaian proyek.
3. IJSP Komunikasi, menyangkut teknologi perangkat lunak yang melibatkan penggunaan komputer serta alat komunikasi modern lainnya.

3.5.4. AGROWISATA

Potensi yang lain di Kabupaten Sigi adalah keindahan alam yang masih asri dan mempunyai nilai jual bila dikelola secara baik sebagai objek wisata alam. Beberapa objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat lokal adalah pemandian air panas di Sigi dan kurawi, bahkan di Kurawi sumber air panas berupa air terjun. Untuk potensi air panas terjun di kurawi berasal dari alam dan sampai saat ini belum dikembangkan secara professional. Sedangkan Sumber air panas di Sigi ternyata sudah digunakan untuk pengobatan dan penyembuhan berbagai penyakit.

Untuk potensi alam yang bisa dikembangkan untuk wisata alam adalah terbang paralayang dengan parasut yang berlokasi di kecamatan pardende Kabupaten Sigi. Dari gunung di atas bukit tersebut terlihat hamparan hijau dan lembah. Sangat cocok untuk wisata terbang paralayang.

Pemanfaatan keindahan sumberdaya alam tersebut dikenal dengan istilah Agrowisata. Peluang sektor pariwisata cukup prospektif, karena selain sebagai salah satu penghasil pertumbuhan ekonomi. Pariwisata diharapkan dapat berpeluang untuk dapat menjadi pendorong pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, seperti sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan lain-lain. Salah satu unsur dari sektor pertanian yang saat ini belum tergarap secara optimal adalah agrowisata. Potensi agrowisata tersebut ditujukan dari keindahan alam pertanian dan produksi di sektor pertanian yang cukup berkembang.

Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.

Perpaduan antara keindahan alam, kehidupan masyarakat pedesaan dan potensi pertanian, apabila ditata secara baik dan ditangani secara serius dapat mengembangkan daya tarik wisata bagi satu daerah tujuan wisata. Agrowisata yang menghadirkan aneka tanaman dapat memberikan manfaat dalam perbaikan kualitas iklim mikro, menjaga siklus hidrologi, mengurangi erosi, melestarikan lingkungan, memberikan desain lingkungan yang estetis bila dikelola dan dirancang dengan baik. Berkembangnya agrowisata di satu daerah tujuan wisata akan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah.

Upaya pengembangan agrowisata pedesaan yang memanfaatkan potensi pertanian, dan melibatkan masyarakat pedesaan, dapat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat selaras dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Pemberdayaan masyarakat dimaksud adalah agrowisata yang dapat mengikutsertakan peran dan aspirasi masyarakat pedesaan selaras dengan pendayagunaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Persoalannya adalah bagaimana masyarakat pedesaan dibina secara berkesinambungan, agar potensi-potensi yang dimiliki daerah dapat digali secara optimal, sehingga dapat memberikan hasil maksimal bagi petani, masyarakat desa, pengusaha dan menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan.

Sejalan dengan itu perlu adanya pola pembinaan agrowisata agar para pelaku pariwisata dan pelaku pertanian secara sinergis dapat merencanakan, menyusun, memprogramkan agrowisata yang bermanfaat bagi masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah.

Perangkat pendukung Agrowisata yang tidak kalah penting adalah usaha jasa penginapan/ Hotel dan rumah makan. Dari penelusuran data Kabupaten Sigi Dalam Angka (2021) diperoleh jumlah Hotel kondisinya mengalami pasang surut di tahun 2015 (29 buah), tahun 2016 (31 buah), tahun 2017 (31 buah), tahun 2018 (30 buah), dan tahun 2019 (36 buah). Sebaliknya jumlah rumah makan terus mengalami kenaikan, hal ini terlihat di tahun 2017 (46 buah), tahun 2018 (58 buah), tahun 2019 (72 buah), dan tahun 2020 (79 buah).

Ada rumah makan yang sangat cocok dengan pengembangan potensi perikanan darat (ikan mujair/nila) yaitu RM NAGAYA di kecamatan Kabobona yang memadukan dengan tempat meeting dan penginapan. Bahkan di depan RM NAGAYA tersebut akan dibangun hotel sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di kabupaten sigi.

3.5.5. DIGITALISASI KELEMBAGAAN EKONOMI (UMKM DAN BUMDES)

Tren perkembangan teknologi informasi yang pesat berdampak signifikan pada semua aspek kehidupan dan menentukan perkembangan ekonomi secara global. Di tengah isu tersebut, timbul optimisme peluang ekonomi baru yang tumbuh dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Memasuki era digital seperti saat ini terlebih dimasa pandemi, digital platform mempunyai peran penting dan mendasar bagi keseluruhan proses bisnis. Hal ini menjadi tantangan yang tinggi bagi UMKM. Fleksibilitas struktur dan pengelolaan harus didukung dengan kemampuan beradaptasi yang cepat bagi pengguna digital tersebut.

Keadaan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, seharusnya penerapan teknologi digital pada UMKM semakin dipercepat karena secara keseluruhan pelaku UMKM ini dihadapkan oleh tantangan bisnis yang secara tidak langsung memaksa mereka untuk dapat beradaptasi dengan teknologi digital. UMKM perlu mendapat dukungan dari

berbagai pihak untuk bertahan, bangkit, bahkan melompat naik dalam perkembangan dan bisnis usaha.

Secara bersama-sama sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi, maupun pelaku usaha sendiri harus dapat mewujudkan transformasi digital pada UMKM. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap transformasi digital UMKM diantaranya penyediaan akses internet di beberapa sentra industri dan pasar tradisional. Disamping itu juga bisnis usaha secara perseorangan, seperti hotel/rumah penginapan, rumah makan, dan ruang publik tidak lepas dari penyediaan internet secara gratis. Oleh karena itu dukungan digital marketing sangat membantu dalam menjangkau pasar secara efektif, efisien, dan terukur.

Potensi digital UMKM kini sudah mulai dikembangkan kaum milenial di kabupaten sigi dengan sudah mulai menggunakan IT untuk memasarkan produk pertanian seperti kopi dengan *e-Commerce*.

Transformasi digital dibutuhkan pada sektor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro kecil, menengah, ultra mikro, dan koperasi yang menjadi tulang punggung perekonomian perdesaan dan/ atau Indonesia.

Menurut Johnny G. Plate (2020), baik BUMDes, UMKM, ultra mikro dan koperasi saat ini mencatatkan kontribusi 61% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Meskipun saat ini, masih 21% dari empat sektor tersebut yang melakukan *digital on boarding*. Jika dibandingkan dengan ASEAN ternyata masih cukup jauh di bawah rata-rata digitalisasi UMKM dan Ultra mikro ASEAN yang pada kisaran 34%. Di saat yang sama, 60% UMKM ultra mikro di Australia telah memiliki *digital presence* atau sudah hadir digital on board, dan 54% UMKM Malaysia telah mengadopsi teknologi digital.

Kedepannya, diharapkan pemerintah terus mendorong agar transformasi digital di Indonesia mampu menghasilkan 50% atau sekitar 30 juta dari 64 juta UMKM untuk on boarding ke sektor digital. Untuk

mencapai hal ini pemerintah terus berupaya mengajak serta melakukan pembinaan yang berkelanjutan pada BUMDes dan koperasi.

Disisi lain Johnny. G Plate (2020) menjelaskan bahwa agenda akselerasi transformasi digital dilakukan demi mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia. Pada tahun 2020, valuasi ekonomi digital nasional tercatat sebesar US\$44 miliar, nilai tersebut berkontribusi 40% dari total valuasi ekonomi digital di Asia Tenggara.

Jadi valuation digital ekonomi Indonesia begitu besar pengaruhnya atau mengambil bagian dari digital ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Di Indonesia, ekonomi digital baru berkontribusi sekitar 4% pada PDB. Nilai tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, misalnya di Malaysia, ekonomi digital berkontribusi 19% pada PDB negara. Sementara itu negara Tiongkok persinya sudah mencapai 36% digital ekonomi berkontribusi pada total PDB. Di Indonesia sendiri telah menargetkan sektor digital menyumbang 18% dari total PDB Indonesia pada tahun 2030. Menurut Joni G. Plate (2020) pada kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara masif dan intensif pada berbagai sektor. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Kominfo, secara intensif memanfaatkan momentum ini untuk mendorong adopsi teknologi digital di sektor UMKM, Ultra mikro, BUMDes dan koperasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait lainnya. Jika Indonesia dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki UMKM, ultra mikro, BUMDes, dan koperasi di sektor digital, Indonesia diproyeksikan mampu mencapai valuasi ekonomi digital sekitar 124 miliar USD pada tahun 2025 dengan pertumbuhan sekitar 23% per tahun atau setiap tahunnya.

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil adalah fokus menyelesaikan empat sektor penting yaitu:

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh tanah air untuk memperkecil digital divide;
2. Penguatan talenta digital sumber daya manusia digital;
3. Integrasi pusat data nasional; dan

4. Peta jalan untuk sektor-sektor prioritas, termasuk tentunya sektor perdagangan, perekonomian, dan industri.

Manfaat digital marketing bagi unit usaha BUMDes sangatlah penting. Memasuki era digital, setidaknya sejak 10 tahun terakhir ini berbagai sektor kehidupan berangsur-angsur beralih menggunakan media digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari baik dalam bidang bisnis ataupun dalam kegiatan personal.

Dari aspek pemanfaatan digital marketing memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Biaya jauh lebih murah dari pada pemasaran konvensional.
2. Target bisa diatur sesuai demografi, domisili, gaya hidup, dan bahkan kebiasaan.
3. Hasil cepat terlihat sehingga pemasaran dapat melakukan tindakan koreksi atau perubahan apabila dirasa ada yang tidak sesuai.
4. Dapat diakses kapanpun tidak terbatas waktu.
5. Hasil dapat diukur, misalnya jumlah pengunjung situs, jumlah konsumen yang melakukan pembelian Online.
6. Jangkauan lebih luas karena tidak terbatas geografis.
7. Dapat melakukan engagement atau meraih konsumen karena komunikasi terjadi secara langsung dan dua arah sehingga pelaku usaha membina relasi dan menumbuhkan kepercayaan konsumen

Bumdes di kabupaten sigi baru mulai berkembang, setelah diterpa Covid-19 hampir selama 20 bulan. Dari 2 (dua) desa yang kami kunjungi di kabupaten sigi yaitu desa kabobona dan Kabupaten Pardende, memperlihatkan bahwa usaha bumbes di desa kabobona baru dengan usaha UMKM dengan pemberian modal pinjaman usaha (Rp500.000,- s.d. Rp1.000.000,-) dan usaha batubata. Nantinya bumdes akan mengembangkan wisata danau Rano untuk masyarakat setempat. Sedangkan di desa Pardende usahanya meliputi kios (24 buah), bengkel cuci motor dan perpustakaan masyarakat (literasi). Disamping itu juga usaha terbang paralayang sedang dikembangkan di desa pardende Kabupaten Sigi. Desa pardende memiliki keindahan bukit yang hijau

sehingga bisa untuk pengembangan wisata paralayang parasut di atas bukit.

3.5.6. PENGEMBANGAN PASAR

Pengembangan pasar merupakan sebuah usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan dari hasil produk yang dihasilkannya. Kegiatan ini merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas usaha ekonomi (Wikipedia Bahasa, 2020).

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan pasar di antaranya secara geografis yaitu membuka pasar tambahan baik berupa perluasan regional, nasional dan internasional. Selain itu pengembangan pasar juga dapat dilakukan dengan cara mengembangkan versi produk, misalnya produk yang ditawarkan menggunakan kemasan yang lebih menarik, dari segi pelayanan dilakukan lebih istimewa atau memasang iklan pada media elektronik, cetak atau media-media sosial yang saat ini lebih mudah untuk di akses masyarakat.

Dari aspek jumlah pasar aktif dan perdagangan yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Sigi terus mengalami perkembangan yang baik. Jika dipetakan kondisi jumlah pasar aktif dan perdagangan adalah sebagai berikut:

Jumlah pasar aktif di Kabupaten Sigi sebanyak 18 buah, sedangkan dari aspek perdagangan terdapat Perdagangan besar (27 buah), perdagangan menengah (99 buah), dan perdagangan kecil (8 buah). Untuk jenisnya sarana perdagangan di Kabupaten Sigi adalah: 18 buah pasar aktif, 55 buah Toko, 383 buah Kios, dan 55 Warung makan.

Pasar di kabupaten sigi sangat perlu untuk ditingkatkan pemanfaatannya untuk menjual hasilhasil pertanian dan peternakan serta perikanan. Disamping untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di kabupaten sigi, pasar sigi juga perlu terhubung dengan akses jalan yang memadai dan transportasi kendaraan. Perdagangan dan ekonomi

masyarakat akan tumbuh dan berkembang, bila pasar berada dalam lokasi yang strategis dan mudah terjangkau di kabupaten sigi.

4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

1. Berdasarkan kajian literatur, kebijakan, diskusi, serta pengalaman empiric di lapangan khususnya di Kabupaten Sigi, ada tiga potensi yang perlu dipertimbangkan dalam rangka intervensi kebijakan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan Kabupaten Sigi. Ketiga potensi itu adalah, ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Ekologi meliputi tiga aspek yaitu, kebencanaan, pemulihan infrastruktur pertanian dan programs pelestarian lingkungan melalui Sigi Hijau. Potensi sosial budaya meliputi tiga aspek peningkatan kewaspadaan konflik, pengembangan budaya lokal, dan pemberdayaan perempuan dan kaum milineal. Potensi ekonomi meliputi pengembangan produk unggulan, agribisnis, agroindustri agrowisata, digitalisasi kelembagaan Ekonomi (BUMDes dan UMKM) dan pengembangan pasar.
2. Ketiga potensi, ekologi, sosial budaya dan ekonomi sangat terkait, ketertinggalan suatu kabupaten lebih banyak disebabkan oleh aspek ekologi (konsisi geografis, mata pencaharian), aspek ekologi tersebut mempengaruhi sosial budaya masyarakat (pendidikan, kesehatan, perilaku dan budaya). Aspek ekologi dan sosial budaya kemudian mempengaruhi aspek ekonomi. Walaupun daerah tertinggal memiliki potensi ekonomi namun karena tidak didukung oleh aspek ekologi dan sosial budaya tidak akan berkembang.

4.2. SARAN/REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Dalam rangka intervensi kebijakan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal agar ketiga potensi (ekologi, sosial budaya dan ekonomi) dilakukan secara bersama-sama dan simultan. Namun demikian faktor ekologi menjadi kunci dalam pengentasan daerah tertinggal. Permasalahan ekologi terkait infrastruktur pertanian mendesak agar segera dipulihkan untuk menghidupkan usaha tani. Infrastruktur dapat dibagi dua, yaitu sarana dan pra sarana pertanian seperti lahan, sistem pengairan, jalan, jembatan, lumbung, dll. Sedangkan infrastruktur sosial (kelembagaan) tak kalah pentingnya untuk diaktifkan kembali, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, informasi pertanian dll.
2. Luas wilayah Kabupaten Sigi 70 % merupakan hutan hal ini dapat dimanfaatkan secara bijak untuk pertanian oleh masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan dan pemenuhan gizi keluarga pasca bencana. Pola atau model pemanfaatan lahan hutan dapat berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemitraan, Hutan Hak dan Pengelolaan Kolaborasi – Zona Khusus. Ada pula pengelolaan hutan model lainnya seperti Hutan Adat, Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) dan Kehutanan Masyarakat (KhM).
3. Kabupaten Sigi merupakan kabupaten daerah tertinggal masuk ke dalam zona kebencanaan karena pernah mengalami likuifaksi dan gempa pada tahun 2018. Untuk itu perlu disusun atau direviu kebijakan penanggulangan bencana (2021-2024) yang berisi penguatan penguatan penanggulangan bencana yang efektif dan sinergi program kegiatan daerah dan K/L serta swasta.
4. Pengembangan ekonomi masyarakat lebih diarahkan pada pengembangan potensi desa dengan pemanfaatan dana desa (DD) secara efektif dengan proporsi untuk pengembangan UMKM 70% dan infrastruktur 30%. Karena rata rata DD untuk UMKM di Kab.Sigi

masih rendah 4-9%. *E-commerce* untuk perdagangan UMKM berbasis IT sudah harus dikembangkan terutama untuk kaum milenial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aditya PN., Evaluasi Pengembangan Wilayah Dalam Meningkatkan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tabalongong. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* Volume 1 Edisi 2 Juli _ Desember 2012.
- Apriyantono, A. 2005. Sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovatif Pascapanen untuk Pengembangan Industri Berbasis Pertanian*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Bogor.
- Austin, J.E. 1981. *Agroindustrial Project Analysis*. The Johns Hopkins University Prss. London
- BPS Kabupaten Sigi. 2021. *Kabupaten Sigi Dalam Angka*. BPS Kabupaten Sigi. Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2011/10/10/01391577/~Regional~Indonesia%20Timur>.
- Bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/berita/seminar-nasional-percepatan-pembangunan-sosial-ekonomi-daerah-tertinggal/Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaaa. Bappenas. *Laporan Akhir Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Daerah Tertinggal untuk Mendukung PP No. 78 Tahun 2014 dan Perpres 131 Tahun 2015*.
- Ensiklopedia Ekonomi Bisnis & Manajemen P-Z*. 1982 Cipta Adi Pustaka.
- Huseini Martani, 2000. *Otonomi Daerah, Integrasi Bangsa, dan Daya Saing Nasional: Saka-Sakti, Suatu Model Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ilyas. 2014. Kajian Penyelesaian Konflik Antar Desa Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad* VOL.06 No. 01 Februari 2014. Hal 1213-1227.

- Johnny, D. Plate. 2020. *Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I.* Jakarta
Kabupaten Sigi, di Provinsi Sulawesi Tengah. <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Konflik%20Sosial%20atau%20Kerusuhan%20Sosial-di-SIGI-SULAWESI%20TENGAH-22-09-2018-8>
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2010. *Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan OVOP (One Village One Product)*. Deputi Menteri Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK
- Muta'ali, L. 2011. *Kapita Selekta Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) UGM.
- Muta'ali, L. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki, 2008. Marzuki, Muhammad. 2008. Membangun Toleransi Dalam Pluralisme Agama. Dalam *Jurnal PERDAMAIAN Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako*. ruang publik sebagai ruang ekspresi generasi muda serta kurangnya pembinaan generasi muda untuk kegiatan yang lebih produktif. 7). Bias informasi dan distorsi informasi.
- Nawawi, Muh, dkk. 2012. Pemetaan Potensi Konflik Sosial dan Kajian Early Warning System Penanganan Konflik berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi. *Laporan Penelitian Fundamental*; dibiayai Dikti Depdikbud. Palu; Lemlit Untad
- Purwasito, Andrik. 2003. *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2018. *Konflik Sosial atau Krisis Sosial di*
- Roma Tressa. 2015. Analisis Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. *eJournal Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. Hal 62-90.
- Simon, Fisher. 2000. *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: British Council.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharso. 2020. *Jabarkan Strategi Bappenas untuk Percepatan Pembangunan 62 Daerah Tertinggal*. Diunduh dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-suharso-jabarkan-strategi-bappenas-untuk-percepatan-pembangunan-62-daerah-tertinggal/>
- Soerjono Soekanto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.86

- Soekartawi. 2000. *Pengantar Agroindustri*. PT Raja Grafindo Jakarta. Jakarta.
- Soewono, L. 2005. Pemanfaatan Teknologi Pasca Panen dalam Pengembangan Agroindustri. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovatif Pascapanen untuk Pengembangan Industri Berbasis Pertanian*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Bogor.
- Sudarsono. 2010. *Identifikasi Potensi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tapin 2009*. Banjarmasin. Diakses 19 Januari 2019. Jakarta
- Shinta Widyaning Cipta, dkk. 2017. Pengembangan Komoditas Unggulan Di Wilayah Pengembangan Tumpang Kabupaten Malang. *Kawistara*, Vol. 7, No. 2, 22 Agustus 2017: 121-133. Malang. Surabaya. Diakses 10 Maret 2018. Jakarta.
- Universitas Kristen Satya Wacana. 2017. *Kriteria Produk Unggulan*. Salatiga. Semarang. Diakses 1 Maret 2019. Jakarta.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi 2020-2024.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal
- Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri. 1999. Kriteria Komoditas Unggulan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 050.05/2910/III/BANDA tanggal 7 Desember 1999, Jakarta.

LAMPIRAN

Gambar 4. Dokumentasi di Lokasi Desa Padende dan Desa Kabobona Kabupaten Sigi







Gambar 5. Dokumentasi Rapat FGD di Ruang Pertemuan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi



Gambar 6. Dokumentasi Diskusi Terkait Kajian di Kantor Bappeda Kabupaten Sigi




Gambar 7. Dokumentasi Rapat Internal Pembahasan Penyusunan Laporan Kajian Potensi Ekologi, Ekonomi, dan Sosial Budaya



Intellectual Wisdom for Smart Policies

www.kemendes.go.id 
pusbangjak@gmail.com 
[@pusbangjak_kemendes](https://www.instagram.com/pusbangjak_kemendes) 
[@Pusbangjak](https://twitter.com/Pusbangjak) 
[PUSBANGJAK.KDPDTT](https://www.facebook.com/PUSBANGJAK.KDPDTT) 

Kementerian Desa PDTT 
Gedung A Lt.1 Sayap Selatan
Jl. TMP Kalibata No.17
Pancoran, Jakarta Selatan

